



SKRIPSI
**ANALISIS PENGARUH KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH
TERHADAP KEMISKINAN PADA KABUPATEN DAN KOTA DI
SUMATERA BARAT**

IFTITA RAHMA

1810511020

Pembimbing Skripsi: Hadi Rahadian, S.E., M.Si.

DEPARTEMEN EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
PADANG
2025

LEMBARAN PENGESAHAN

Dengan ini menyatakan bahwa:

ANALISIS PENGARUH KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH
TERHADAP KEMISKINAN PADA KABUPATEN DAN KOTA DI
SUMATERA BARAT

Oleh:

Ifita Rahma

Telah diuji dan dinyatakan lulus pada Rabu, 30 Juli 2025

Diajukan ke Departemen Ekonomi

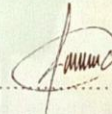
Untuk memenuhi sebagian syarat dalam mencapai derajat

Sarjana Ekonomi

di

UNIVERSITAS ANDALAS

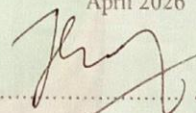
Penulis.....



Departemen Ekonomi

April 2026

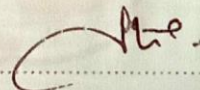
Mengesahkan.....



Hadi Rahadian, S.E., M.Si.

Pembimbing Skripsi

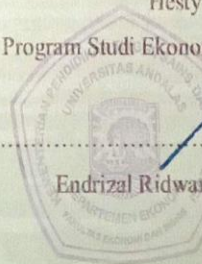
Menerima.....



Hesty Aisyah, S.E., M.Si.

Ketua Program Studi Ekonomi Program Sarjana

Menyetujui.....



Endrizal Ridwan, S.E., M.Ec, Ph.D.

Ketua Departemen

ANALISIS PENGARUH KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP KEMISKINAN PADA KABUPATEN DAN KOTA DI SUMATERA BARAT

Oleh:

IFTITA RAHMA

1810511020

UNIVERSITAS ANDALAS

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah (KKD), Pengeluaran Pemerintah Daerah (PPD), dan Belanja Modal (BM) terhadap tingkat kemiskinan pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat. Kemiskinan tetap menjadi isu krusial dalam pembangunan ekonomi daerah, sehingga peran kebijakan fiskal melalui pengelolaan pendapatan dan belanja daerah menjadi sangat penting. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa data panel dari 19 kabupaten dan kota di Sumatera Barat selama periode 2011–2024. Metode analisis yang digunakan adalah regresi data panel dengan model terpilih yaitu Fixed Effect Model (FEM). Pengolahan data dilakukan dengan bantuan perangkat lunak Stata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial, Kemandirian Keuangan Daerah (KKD) memiliki pengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap kemiskinan. Pengeluaran Pemerintah Daerah (PPD) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan, yang mengindikasikan bahwa belanja publik pada sektor pelayanan dasar efektif dalam menekan angka kemiskinan. Sebaliknya, Belanja Modal (BM) ditemukan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan, yang mengindikasikan adanya jeda waktu dampak pembangunan infrastruktur atau alokasi yang belum sepenuhnya menyentuh lapisan masyarakat miskin secara langsung. Secara simultan, ketiga variabel independen berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat dengan nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 42,11%.

Kata Kunci: Kemiskinan, Kemandirian Keuangan Daerah, Pengeluaran Pemerintah Daerah, Belanja Modal.

Pembimbing Skripsi: Hadi Rahadian, S.E., M.Si.

PERNYATAAN ANTI PLAGIARISME

Saya menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “**Analisis Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah Terhadap Kemiskinan Pada Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat**” merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak ada sebagian maupun keseluruhan hasil karya orang lain yang saya kutip tanpa memberikan penghargaan kepada penulis aslinya. Bahagian yang bersumber dari karya orang lain telah saya cantumkan sumbernya sesuai dengan norma, etika, dan kaidah penulisan ilmiah. Apabila dikemudian hari ditemukan unsur plagiarisme dalam skripsi ini, saya siap menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Padang, 20 April 2026



Ifita Rahma

1810511020

KATA PENGANTAR

Segala puji bahi Allah SWT yang selalu melimpahkan rahmat, karunia serta hidayah Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Analisis Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah Terhadap Kemiskinan Pada Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat”**. Serta tak lupa pula shalawat dan salam kepada tauladan kita Nabi besar Muhammad SAW. Skripsi ini merupakan salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarja Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas.

Penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam memberikan dukungan terhadap penulisan skripsi ini baik moril maupun materil, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Fery Andrianus, S.E., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas
2. Bapak Endrizal Ridwan, S.E., M.Ec, Ph.D selaku Ketua Departemen Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas
3. Ibu Hesty Aisyah, S.E., M.Si selaku Ketua Program Studi Ekonomi Departemen Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas.
4. Bapak Hadi Rahadian, S.E., M. Si selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktunya di tengah kesibukan, memberikan arahan dan menyumbangkan ide sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT memberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah untuk bapak dan keluarga.
5. Ibu Dr. Sri Maryati, S.E., M.Si dan Ibu Ratih Ramadhani, SE, MSE selaku dosen pembahas skripsi yang telah memberikan arahan, sasaran dan perbaikan dalam penyempurnaan skripsi penulis.
6. Kak Rina selaku staff Biro Departemen Ekonomi yang telah banyak membantu dalam urusan akademik selama di perkuliahan hingga pengurusan persiapan wisuda penulis.
7. Seluruh dosen dan staff Departemen Ekonomi yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan ilmu pembelajaran yang bermanfaat dan bantuan selama masa perkuliahan.

Selain itu, penulis juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang-orang yang selama ini telah menjadi inspirasi dan semangat dalam kehidupan penulis:

1. Kepada kedua orang tua tercinta Ayah Deswandra Dt. Tan Marajo dan Ibu Litna Juita (Almh) yang selalu memberikan cinta dan kasih sayang dalam membesarkan dan mendidik penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Gelar ini penulis persembahkan dengan bangga kepada kalian. Semoga Allah SWT memberikan kebahagiaan dan keselamatan dunia dan akhirat.
2. Kepada kakak perempuan satu-satunya penulis, Qorri Kurnia Lestari, S.H dan abang ipar Yogi Andryan, S.M yang telah memberikan dukungan baik secara materil maupun moral kepada penulis.
3. Kepada teman-teman seperjuangan yang telah memberikan dukungan, motivasi, semangat dan bantuan selama proses penyusunan skripsi ini.
4. Terakhir, terima kasih kepada diri saya sendiri yang telah bertahan hingga sejauh ini. Terima kasih atas kerja kerasnya untuk menyelesaikan skripsi ini sebaik mungkin.

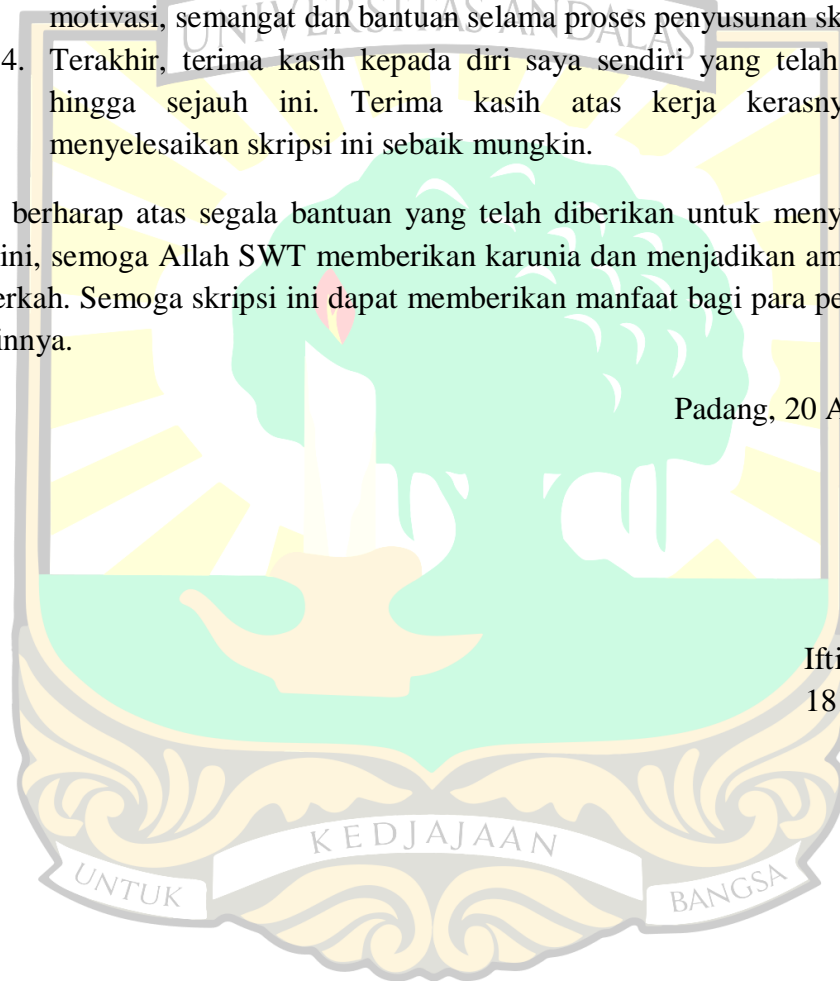
Penulis berharap atas segala bantuan yang telah diberikan untuk menyelesaikan skripsi ini, semoga Allah SWT memberikan karunia dan menjadikan amal ibadah yang berkah. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pengemban ilmu lainnya.

Padang, 20 April 2026

Penulis

Iftita Rahma

1810511020



DAFTAR ISI

LEMBARAN PENGESAHAN	i
ABSTRAK	ii
PERNYATAAN ANTI PLAGIARISME	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Teori Rujukan Utama	10
2.1.1 Kemiskinan	10
2.1.2 Kemandirian Keuangan Daerah	13
2.1.3 Belanja Modal	18
2.1.4 Pengeluaran Pemerintah Daerah	21
2.2 Penelitian Terdahulu	23
2.3 Hubungan antar Variabel	26
2.4 Kerangka Berpikir	28
2.5 Hipotesis Penelitian	28
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Pendekatan Penelitian	29
3.2 Jenis dan Sumber Data	29
3.3 Definisi Operasional Variabel	29
3.4 Model Penelitian	31

3.5 Teknik Analisis Data.....	32
-------------------------------	----

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

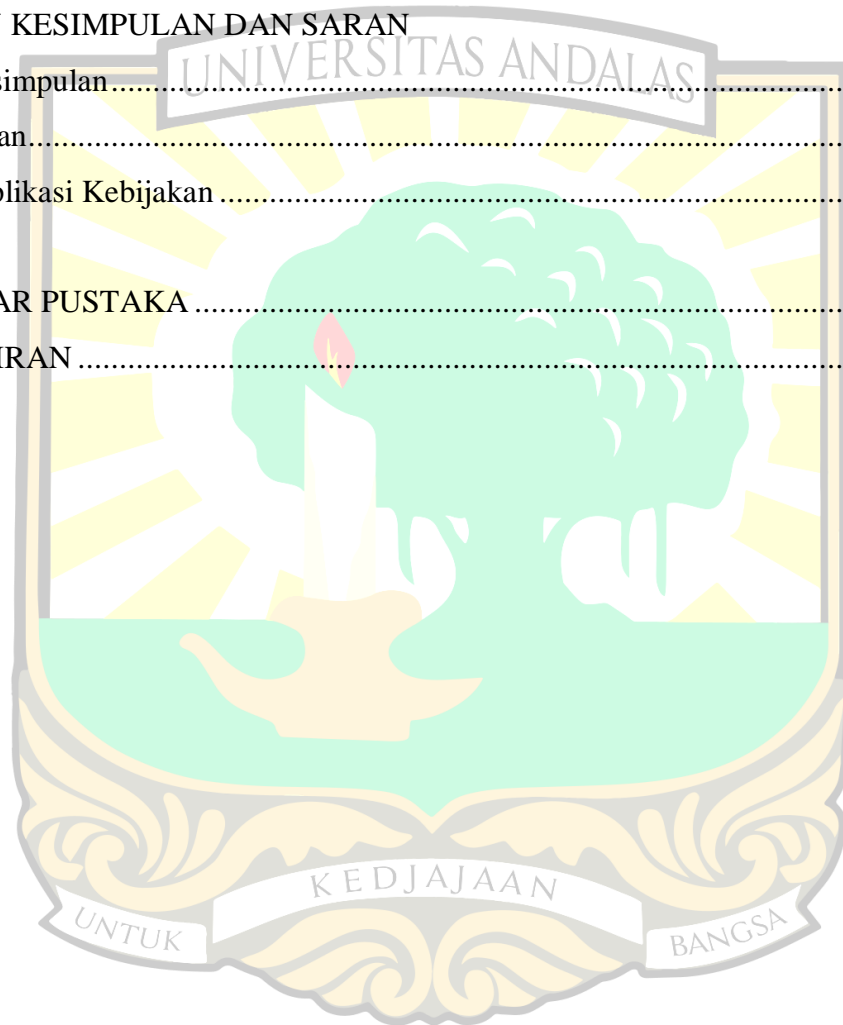
4.1 Perkembangan Variabel Penelitian	37
4.2 Hasil Uji Analisis Data.....	44
4.3 Hasil Penelitian dan Pembahasan	49

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan.....	54
5.2 Saran.....	56
5.3 Implikasi Kebijakan	58

DAFTAR PUSTAKA	60
----------------------	----

LAMPIRAN	63
----------------	----



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penduduk Miskin di Indonesia dan Sumatera Barat tahun 2019-2024 ...	3
Tabel 1.2 Tingkat Kemiskinan Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat	4
Tabel 4.1 Kemiskinan Sumatera Barat Tahun 2022-2024 (%)	39
Tabel 4.2 Kemandirian Keuangan Daerah Sumatera Barat	40
Tabel 4.3 Belanja Modal Sumatera Barat Tahun 2022-2024 (%)	41
Tabel 4.4 Pengeluaran Pemerintah Daerah Sumatera Barat	43
Tabel 4.5 Hasil Uji Chow	45
Tabel 4.6 Hasil Uji Hausman	45
Tabel 4.7 Uji Normalitas	46
Tabel 4.8 Uji Multikolinearitas	47
Tabel 4.9 Uji Heteroskedastisitas	47
Tabel 4.10 Hasil Uji Hipotesis FEM	49



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Penelitian.....28



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem otonomi daerah telah di aplikasikan pada sistem pemerintahan Indonesia sebagai instrumen untuk memperbaiki mutu layanan publik setelah tahun 1998. Berdasarkan kerangka hukum UU No. 23 Tahun 2004, pemerintah daerah kini mempunyai diskresi luas pada tata kelola pemerintahan dan manajemen fiskal. Dalam konteks ini, Halim (2007) menegaskan bahwa kemandirian keuangan daerah tercermin dari sejauh mana kapasitas fiskal daerah mampu mengonversi potensi ekonomi lokal menjadi sumber pendanaan pembangunan primer.

Kapasitas fiskal suatu daerah dalam mendanai agenda pembangunan sangat determinan terhadap kontribusi PAD. Klasifikasi PAD terhadap total pendapatan merefleksikan derajat kemandirian fiskal daerah. Tingkat kemandirian fiskal yang optimal memberikan diskresi guna meningkatkan fleksibilitas bagi pemerintah daerah dalam mengartikulasikan serta mengimplementasikan kebijakan pembangunan yang relevan dengan kebutuhan prioritas masyarakat lokal (Kuncoro, 2010).

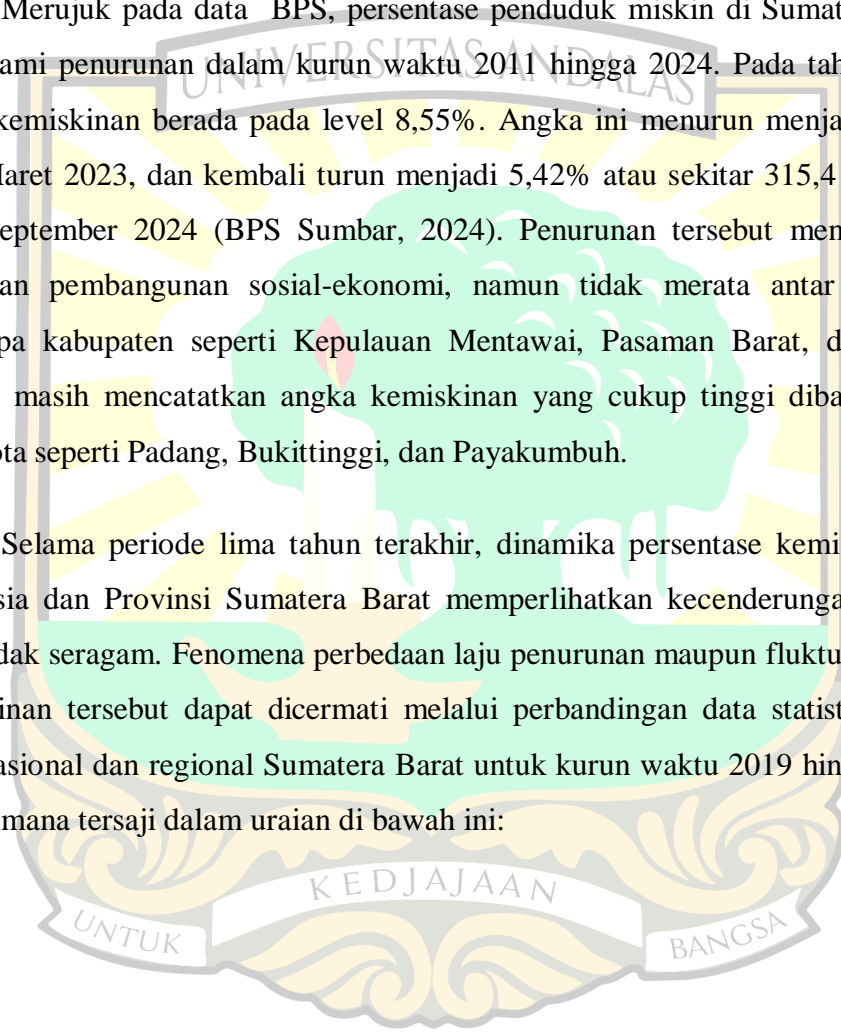
Alokasi belanja daerah memiliki dimensi strategis dalam mengakselerasi kesejahteraan masyarakat. Belanja modal menempati posisi krusial dalam struktur fiskal daerah sebagai bentuk investasi produktif yang dialokasikan untuk penyediaan aset tetap, seperti infrastruktur mobilitas, layanan kesehatan, dan fasilitas edukasi. Menurut Darwanto (2015), efektivitas distribusi anggaran ini memberikan dampak jangka panjang yang signifikan dalam memperluas aksesibilitas ekonomi, menstimulasi pertumbuhan wilayah, serta meningkatkan standar pelayanan publik secara menyeluruh.

Pengeluaran pemerintah daerah secara keseluruhan juga berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Peningkatan alokasi pengeluaran pemerintah daerah secara linier memperluas ruang fiskal yang tersedia untuk mendanai

berbagai agenda pembangunan strategis dan penguatan pelayanan publik. Ekspansi anggaran ini memungkinkan daerah untuk mengoptimalisasi program-program prioritas pada sektor pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur, serta skema perlindungan sosial guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara komprehensif. Namun, apabila sebagian besar pengeluaran terserap untuk belanja rutin, maka dampak terhadap penurunan kemiskinan akan lebih terbatas.

Merujuk pada data BPS, persentase penduduk miskin di Sumatera Barat mengalami penurunan dalam kurun waktu 2011 hingga 2024. Pada tahun 2011, angka kemiskinan berada pada level 8,55%. Angka ini menurun menjadi 5,95% pada Maret 2023, dan kembali turun menjadi 5,42% atau sekitar 315,4 ribu jiwa pada September 2024 (BPS Sumbar, 2024). Penurunan tersebut menunjukkan kemajuan pembangunan sosial-ekonomi, namun tidak merata antar wilayah. Beberapa kabupaten seperti Kepulauan Mentawai, Pasaman Barat, dan Solok Selatan masih mencatatkan angka kemiskinan yang cukup tinggi dibandingkan kota-kota seperti Padang, Bukittinggi, dan Payakumbuh.

Selama periode lima tahun terakhir, dinamika persentase kemiskinan di Indonesia dan Provinsi Sumatera Barat memperlihatkan kecenderungan (trend) yang tidak seragam. Fenomena perbedaan laju penurunan maupun fluktuasi angka kemiskinan tersebut dapat dicermati melalui perbandingan data statistik antara level nasional dan regional Sumatera Barat untuk kurun waktu 2019 hingga 2024 sebagaimana tersaji dalam uraian di bawah ini:



**Tabel 1.1 Penduduk Miskin di Indonesia dan Sumatera Barat tahun
2019–2024**

Tahun	Indonesia (%)	Perubahan Tahunan Indonesia (%)	Sumatera Barat (%)	Perubahan Tahunan Sumatera Barat (%)
2019	9,41	-	6,82	-
2020	10,19	0,78	6,42	-0,40
2021	10,14	-0,05	6,34	-0,08
2022	9,54	-0,60	5,93	-0,41
2023	9,38	0,16	5,92	-0,01
2024	9,03	0,35	5,96	0,04

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Representasi data pada Tabel 1.1 menunjukkan bahwa dinamika kemiskinan, baik pada level nasional maupun regional Provinsi Sumatera Barat, memperlihatkan kecenderungan yang fluktuatif selama periode 2019–2024. Secara nasional, prevalensi penduduk miskin terdeteksi mengalami eskalasi dari 9,41% di tahun 2019 menjadi 10,19% pada tahun 2020, dengan peningkatan 0,78 poin persen. Meskipun demikian, pasca-tahun 2021 hingga 2024, tren kemiskinan nasional menunjukkan de-eskalasi yang konsisten hingga mencapai angka 9,03% pada tahun 2024. Fenomena ini merefleksikan efektivitas proses pemulihan ekonomi nasional yang berlangsung secara gradual dan berkelanjutan.

Berbeda dengan dinamika nasional, tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat justru menunjukkan kecenderungan yang relatif lebih stabil. Pada tahun 2019, prevalensi penduduk miskin tercatat sebesar 6,82% yang mengalami kontraksi menjadi 6,42% pada tahun 2020, atau terjadi reduksi sebesar 0,40 persen. Anomali terhadap tren nasional ini mengindikasikan adanya efektivitas intervensi kebijakan pemerintah daerah dalam memitigasi dampak pandemi, baik melalui penguatan jaring pengaman sosial maupun stimulasi ekonomi lokal. Tren de-eskalasi kemiskinan di Sumatera Barat terus berlanjut hingga mencapai titik terendah pada tahun 2022 di angka 5,93%. Meskipun demikian, pada tahun 2024 terdeteksi adanya fluktuasi minor berupa peningkatan tipis menjadi 5,96%, yang menunjukkan kenaikan sebesar 0,04 persen dibandingkan periode sebelumnya.

Secara komprehensif, statistik kemiskinan Provinsi Sumatera Barat secara konsisten menunjukkan tingkat yang lebih rendah dibandingkan rerata nasional sepanjang periode observasi 2019–2024. Meskipun demikian, tren perubahan tahunan menunjukkan bahwa daerah ini juga menghadapi tantangan dalam menjaga konsistensi penurunan angka kemiskinan, terutama pada tahun-tahun tertentu ketika terjadi tekanan ekonomi. Fakta ini menegaskan pentingnya kapasitas fiskal dan kebijakan pengeluaran pemerintah daerah dalam menopang program-program pengentasan kemiskinan. Perubahan tingkat kemiskinan Provinsi Sumatera Barat memperlihatkan tren perkembangan fluktuatif namun cenderung terkendali sepanjang periode pengamatan lima tahun terakhir:

Tabel 1.2 Tingkat Kemiskinan Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat tahun 2019–2024 (Persen)

Kabupaten/Kota	2019	2024	Perubahan 2019–2024
Kab. Kepulauan Mentawai	14,43	13,89	-0,54
Kab. Pesisir Selatan	7,88	7,49	-0,39
Kab. Solok	7,98	7,31	-0,67
Kab. Sijunjung	7,04	5,78	-1,26
Kab. Tanah Datar	4,66	4,28	-0,38
Kab. Padang Pariaman	7,10	6,27	-0,83
Kab. Agam	6,75	6,83	0,08
Kab. Lima Puluh Kota	6,97	6,92	-0,05
Kab. Pasaman	7,21	6,74	-0,47
Kab. Solok Selatan	7,33	6,56	-0,77
Kab. Dharmasraya	6,29	5,32	-0,97
Kab. Pasaman Barat	7,14	7,00	-0,14
Kota Padang	4,48	4,06	-0,42
Kota Solok	3,24	3,07	-0,17
Kota Sawahlunto	2,17	2,33	0,16
Kota Padang Panjang	5,60	5,31	-0,29
Kota Bukittinggi	4,60	4,08	-0,52
Kota Payakumbuh	5,68	5,19	-0,49
Kota Pariaman	4,76	4,26	-0,50

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat, 2024

Analisis terhadap statistik tingkat penduduk miskin pada kabupaten /kota di Sumatera Barat sepanjang rentang waktu 2019–2023 memperlihatkan kecenderungan penurunan (de-eskalasi), meskipun dengan laju percepatan yang bervariasi antar wilayah. Kota Padang tercatat sebagai wilayah dengan reduksi

kemiskinan paling impresif, di mana prevalensi penduduk miskin terkontraksi dari 6,90% pada 2021 hingga mencapai 4,12% pada 2023. Pencapaian tersebut merefleksikan keberhasilan implementasi program strategis serta resiliensi pemulihan ekonomi yang lebih progresif di pusat perkotaan. Di sisi lain, Kabupaten Agam dan Kabupaten Solok juga memperlihatkan tren penurunan yang konsisten. Meskipun tren penurunan terjadi secara umum, Kabupaten Pesisir Selatan secara konsisten masih mencatatkan persentase kemiskinan tertinggi dalam lima tahun terakhir, walaupun secara bertahap angkanya menurun dari 10,38% (2020) menjadi 9,40% (2023). Kondisi serupa terjadi di Kabupaten Tanah Datar yang mengalami penurunan relatif lambat, yakni dari 8,81% pada tahun 2020 ke posisi 8,00% pada tahun 2023. Fenomena ini mengindikasikan bahwa ketimpangan fiskal serta disparitas kapasitas manajerial anggaran daerah menjadi determinan utama yang memengaruhi akselerasi pengentasan kemiskinan di tiap wilayah.

Variasi laju penurunan kemiskinan tersebut diduga kuat berkorelasi dengan derajat kemandirian fiskal daerah, alokasi belanja modal, serta agregat pengeluaran pemerintah pada masing-masing wilayah. Daerah dengan kapasitas fiskal yang mumpuni memiliki fleksibilitas lebih besar dalam mendistribusikan anggaran untuk agenda pembangunan, seperti jaring pengaman sosial, penyediaan infrastruktur dasar, dan optimalisasi layanan publik yang berdampak langsung pada kesejahteraan (Syahrial & Harahap, 2019). Sebaliknya, wilayah dengan ketergantungan tinggi pada dana transfer pusat dan keterbatasan kapasitas fiskal cenderung menghadapi hambatan dalam mengimplementasikan program pengentasan kemiskinan secara mandiri (Gunawan & Haryanto, 2018).

Dalam upaya mempercepat reduksi kemiskinan, otoritas pemerintahan di wilayah Sumatera Barat mengarahkan alokasi sumber-sumber pendanaan dari PAD pada berbagai program pembangunan strategis. Kebijakan ini selaras dengan amanat UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, yang menyediakan diskresi pada pemerintah daerah guna mengoptimalkan potensi lokal sesuai dengan prioritas kebutuhan daerah (Kemenkeu RI, 2022). Sejalan dengan fungsi APBD sebagai sarana

kebijakan fiskal utama, pemerintah daerah berkewajiban menyusun perencanaan anggaran yang memuat rincian pendapatan dan belanja secara komprehensif untuk mendukung intervensi sosial (Bappeda Sumatera Barat, 2023). Peningkatan realisasi PAD Sumatera Barat yang mencapai 11,61% pada periode 2022 menunjukkan adanya penguatan kapasitas fiskal daerah yang bersumber dari optimalisasi pajak, retribusi, serta pengelolaan kekayaan daerah lainnya (Bapenda Sumatera Barat, 2023).

Alokasi PAD untuk penanggulangan kemiskinan di Sumatera Barat diwujudkan dalam berbagai program-program sosial misalnya, tahun 2024 Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengalokasikan Rp 42 miliar untuk mendukung operasional 117 panti sosial dan asuhan bagi anak yatim, penyandang disabilitas, lansia, dan kelompok rentan lainnya, dengan rencana kenaikan menjadi Rp 49 miliar pada tahun 2025 (kabar publik.id, 2024).

Penggunaan PAD untuk program-program tersebut diawasi dan dievaluasi secara berkala oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Bappeda Sumatera Barat untuk memastikan efektivitas dan efisiensi pelaksanaannya. Hasil audit BPK tahun 2023 menunjukkan bahwa meskipun terdapat alokasi PAD untuk program kemiskinan, proporsinya masih kecil dibandingkan dengan total belanja daerah (BPK Perwakilan Sumatera Barat, 2023).

Pengukuran kemandirian fiskal daerah dapat dilakukan melalui berbagai instrumen rasio, serta kapasitas dalam mendanai urusan wajib dan pilihan. Wilayah yang mencatatkan rasio tinggi merefleksikan performa fiskal yang mumpuni serta tata kelola keuangan yang lebih efisien (Kuncoro, 2010). Dalam konteks ini, penguatan kemandirian fiskal memberikan fleksibilitas bagi pemerintah daerah untuk menginisiasi inovasi program penanggulangan kemiskinan yang bersifat berkelanjutan dan berorientasi pada potensi sumber daya lokal.

Fokus utama penelitian ini diarahkan pada analisis keterkaitan antara kemandirian finansial daerah, alokasi belanja modal, serta agregat pengeluaran pemerintah dengan fluktuasi tingkat kemiskinan pada Kabupaten/Kota di

Sumatera Barat pada rentang tahun 2011–2024. Penentuan periode pengamatan tersebut didasarkan pada pertimbangan konsistensi data serta upaya untuk menangkap dinamika signifikan, mulai dari fase pasca-otonomi fiskal dan pengimplementasian dana desa hingga periode disrupsi ekonomi akibat pandemi COVID-19. Studi ini diproyeksikan dapat memberikan kontribusi secara teoretis maupun aplikatif dalam memformulasikan kebijakan fiskal daerah yang lebih akseleratif dan berkelanjutan guna mereduksi kemiskinan secara inklusif. Berangkat dari kompleksitas fenomena tersebut, studi ini disusun berjudul “Analisis Pengaruh Kemampuan Kemandirian Keuangan Daerah Terhadap Kemiskinan Pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat.”

1.2 Rumusan Masalah

Studi ini bertujuan mengkaji fenomena ekonomi dimana terangkum dalam judul “Analisis Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah Terhadap Kemiskinan pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat.” Selaras dengan fokus tersebut, problematika studi ini disusun secara metodis untuk menginvestigasi korelasi antara kapasitas fiskal daerah dengan fluktuasi prevalensi kemiskinan pada lokus penelitian. Rumusan masalah yang dikembangkan bertujuan untuk menguji serta menganalisis secara empiris pengaruh signifikansi kemandirian fiskal, alokasi belanja modal, serta agregat pengeluaran pemerintah terhadap dinamika kemiskinan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat dalam rentang waktu 2011–2024.

1.3 Tujuan Penelitian

Kajian ini difokuskan pada evaluasi empiris mengenai pengaruh variabel kemandirian keuangan daerah, belanja modal, serta pengeluaran pemerintah daerah terhadap tingkat kemiskinan. Analisis dilakukan terhadap data panel pada tingkatan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat, mulai dari 2011 sampai 2024.

1.4 Manfaat Penelitian

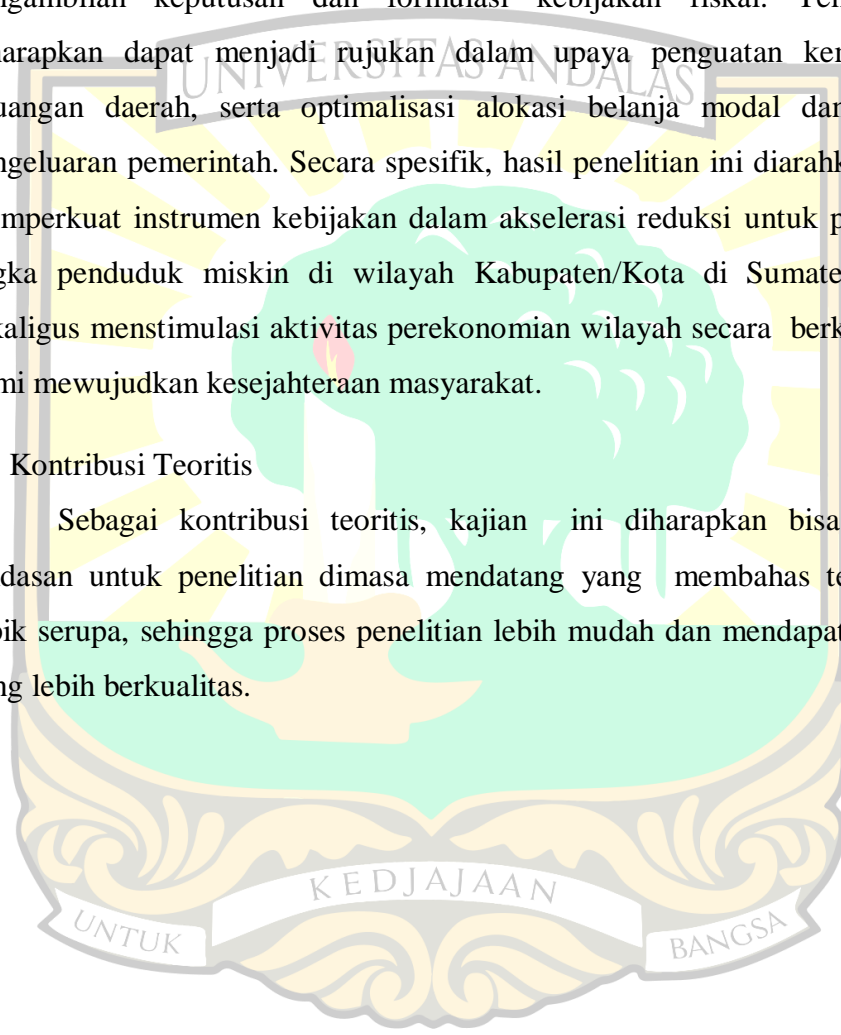
Sejalan dengan sasaran yang ingin direalisasikan, studi ini memiliki manfaat sebagai berikut:

a. Kontribusi Praktis

Untuk pemerintah daerah, studi ini diproyeksikan mampu memberikan kontribusi substantif sebagai referensi strategis dalam proses pengambilan keputusan dan formulasi kebijakan fiskal. Temuan ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam upaya penguatan kemandirian keuangan daerah, serta optimalisasi alokasi belanja modal dan agregat pengeluaran pemerintah. Secara spesifik, hasil penelitian ini diarahkan untuk memperkuat instrumen kebijakan dalam akselerasi reduksi untuk penurunan angka penduduk miskin di wilayah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat, sekaligus menstimulasi aktivitas perekonomian wilayah secara berkelanjutan demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

b. Kontribusi Teoritis

Sebagai kontribusi teoritis, kajian ini diharapkan bisa menjadi landasan untuk penelitian dimasa mendatang yang membahas tema serta topik serupa, sehingga proses penelitian lebih mudah dan mendapatkan hasil yang lebih berkualitas.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Rujukan Utama

Kapasitas fiskal serta otonomi keuangan daerah memegang peranan determinan untuk mengoptimalkan capaian pembangunan serta taraf hidup masyarakat. Merujuk pada postulat Musgrave (1959) mengenai tri-fungsi keuangan publik yaitu alokasi, distribusi, dan stabilisasi dimana pemerintah daerah dituntut untuk melakukan redistribusi sumber daya secara efektif. Kemandirian keuangan yang diproyeksikan melalui penguatan PAD dalam memberikan perubahan kebijakan dalam upaya mengintervensi persoalan kemiskinan. Secara teoretis, perluasan ruang fiskal ini akan mendorong efisiensi pelayanan publik dan program proteksi sosial, yang pada gilirannya mengakselerasi tren penurunan kemiskinan secara sistemik.

2.1.1 Kemiskinan

Definisi kemiskinan dipahami sebagai suatu kondisi keterbatasan seseorang dalam merealisasikan kebutuhan esensial untuk mencapai standar cara berkehidupan yang layak. Dari definisi tersebut menegaskan bahwa kemiskinan merupakan permasalahan yang bersifat multidimensional, sehingga memerlukan pendekatan pengukuran yang komprehensif dan disepakati bersama, mengingat kompleksitas dalam mengidentifikasi dan mengukur tingkat kemiskinan secara akurat.

Menurut Todaro dan Smith (2013) kemiskinan merupakan permasalahan global yang sering dihadapi. Negara miskin menjadi masalah pertumbuhan serta pendapatan seseorang tidak merata serta negara berkembang mengalami pertumbuhan penduduk tinggi tapi rendah kualitas hidup. Negara berkembang tidak memberikan manfaat penduduk miskin mencapai standar hidup layak. Dalam Kuncoro (2004) Kemiskinan bisa dikatakan sebagai ketidakmampuan memenuhi standar hidup didasarkan konsumsi. Garis kemiskinan berdasarkan tingkat konsumsi diklasifikasikan ke dalam 2 macam, yaitu: (a) Pengeluaran

digunakan membeli standar gizi minimum dibutuhkan, (b) Kebutuhan beragam, mencerminkan biaya partisipasi kehidupan masyarakat.

Determinasi kategori penduduk miskin didasarkan pada komparasi antara rerata konsumsi per kapita bulanan dengan instrumen ambang batas yang dikenal sebagai GK. Garis kemiskinan tersebut merupakan representasi nominal dari standar pengeluaran minimal yang wajib dipenuhi oleh individu guna menjamin pemenuhan kebutuhan dasar esensial. Secara metodologis, indikator ini mengombinasikan dua parameter fundamental: GKM, yang mengukur nilai moneter untuk pemenuhan nutrisi sebesar 2.100 kilokalori per kapita setiap hari, dan GKBM, yang memuat alokasi biaya kebutuhan non-pangan krusial, seperti hunian, layanan kesehatan, serta pendidikan. Secara matematis, kalkulasi garis kemiskinan didefinisikan oleh BPS (2023) melalui formulasi berikut:

$$\mathbf{GK = GKM + GKNM} \quad (2.1)$$

Dimana:

- a) GK = Garis Kemiskinan
- b) GKM = Kebutuhan makanan dan minuman dipresentasikan berdasarkan ambang batas konsumsi energi sebesar 2.100 kkal per kapita setiap harinya.
- c) GKNM = pengeluaran untuk pemenuhan kebutuhan bukan makanan, contohnya pendidikan, perumahan, serta kesehatan.

Menurut Chambers dalam Nasikun (2001) klasifikasi kemiskinan terdiri dari empat bentuk, sebagai berikut:

1. Kemiskinan Absolut, adalah ketika seseorang dengan penghasilannya lebih rendah dari garis kemiskinan bahkan tidak mencukupi kebutuhan dasar mereka, 12 yang mencakup kebutuhan akan makanan, pakaian, perumahan, kesehatan, serta pendidikan untuk meningkatkan kemampuan mereka untuk hidup dan bekerja
2. Kemiskinan Relatif, ketika pendapatan seseorang melebihi tingkat kemiskinan tetapi masih jauh dibawah pendapatan lingkungan.

3. Kemiskinan Kultural, cara hidup serta nilai-nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat, memiliki kontribusi pada terwujudnya kemiskinan kultural
4. Kemiskinan Struktural, disebabkan oleh struktur sosial dan ketimpangan pendapatan.

Kuncoro (2000) berpendapat bahwa suatu kemiskinan negara saling berkaitan, negara menjadi miskin karena kemiskinan itu sendiri. Kondisi miskin tersebut tidak memiliki titik awal yang jelas, karena ketiadaan sumber daya atau kemampuan menyebabkan negara berada dalam keadaan miskin terus-menerus. Pemikiran mengenai kemiskinan pun mengalami perkembangan, tercermin dalam paradigma kemiskinan modern. Dalam pendekatan ini, kemiskinan tidak lagi semata-mata dinilai dari aspek fisik, tetapi mencakup berbagai dimensi lain yang mempengaruhi kualitas hidup seseorang. Contoh-contoh dari paradigma baru ini:

- Keamanan: Produktivitas tenaga kerja sangat dipengaruhi oleh stabilitas lingkungan kerja. Ketika lingkungan bebas dari konflik dan kekacauan, pekerja dapat bekerja dengan maksimal, memperoleh penghasilan, dan memenuhi kebutuhan hidup mereka.
- Kebijakan: Langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah memiliki dampak langsung terhadap tingkat kemiskinan. Jika kebijakan tersebut tidak sesuai dengan karakteristik dan kondisi wilayah, maka pencapaian tujuan akan meleset dari sasaran.
- Kebebasan: Pemberian kebebasan kepada tenaga kerja dalam memilih dan menjalankan pekerjaannya dapat mendorong terciptanya inovasi dan meningkatkan efisiensi kerja. Situasi ini berpengaruh positif terhadap pendapatan yang diperoleh.
- Sumber daya: Wilayah yang minim sumber daya cenderung tertinggal dibandingkan daerah lain, karena kurang mampu bersaing secara ekonomi dan sosial.
- Aksesibilitas: Penduduk yang tinggal jauh dari sarana pemenuhan kebutuhan hidup, layanan sosial, atau sumber informasi akan menghadapi kendala dalam memperoleh hal-hal dasar untuk bertahan hidup.

- Politik: Ketidakstabilan politik di suatu daerah, terutama jika tiap kelompok lebih mementingkan kepentingan sendiri, akan memicu konflik, menimbulkan rasa tidak aman, dan membentuk polarisasi masyarakat.
- Ketimpangan: Ketidakseimbangan dalam distribusi kekayaan dan akses di masyarakat bisa memicu kemiskinan relatif, karena kesenjangan yang tinggi menimbulkan rasa ketidakadilan sosial.
- Sosial: Lingkungan sosial yang buruk, seperti tingginya tingkat perjudian dan konsumsi alkohol, dapat memperparah kondisi kemiskinan karena mempengaruhi perilaku dan produktivitas masyarakat.

2.1.2 Kemandirian Keuangan Daerah

Bagian ini mencerminkan kapasitas pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya keuangannya untuk membiayai pembangunan serta pelayanan publik, dengan tingkat ketergantungan yang minimal terhadap transfer dari pemerintah pusat. Berdasarkan kerangka pemikiran Prihatiningsih (2010), tingkat kemandirian tersebut bisa diperhitungkan menggunakan rasio PAD terhadap total penerimaan daerah. Peningkatan proporsi PAD dalam struktur pendapatan daerah menunjukkan semakin kuatnya tingkat kemandirian fiskal suatu wilayah.

Fenomena tersebut mengindikasikan bahwa akselerasi penerimaan domestik, terutama melalui optimalisasi pajak dan retribusi daerah, memiliki determinan krusial dalam menguatkan kemandirian fiskal. Oleh karena itu, derajat kemandirian keuangan tidak sekadar merefleksikan kapasitas daerah dalam mendanai alokasi belanja secara otonom, namun juga menjadi parameter fundamental dalam mengukur tingkat dependensi fiskal daerah terhadap otoritas pemerintah pusat.

Otonomi fiskal merupakan parameter esensial dalam meninjau kapabilitas otoritas daerah untuk mengelola fungsi pemerintahan serta distribusi pelayanan publik secara mandiri. Dalam paradigma desentralisasi, eskalasi kontribusi PAD mencerminkan konsolidasi kemandirian fiskal yang secara paralel menunjukkan penurunan tingkat dependensi finansial terhadap anggaran nasional (DJPk-Kemenkeu, 2011).

Merujuk pada metodologi yang dikembangkan oleh Halim (2004), tingkat kemandirian fiskal suatu daerah bisa dikuantifikasi menggunakan rasio perolehan PAD dengan total Dana Perimbangan, yang secara sistematis diformulasikan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{PAD}}{\text{Dana Perimbangan}} \times 100\% \quad (2.2)$$

2.1.2.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD ialah agregasi dari seluruh penerimaan daerah yang diekstraksi secara optimal dengan beragam potensi ekonomi di dalam ruang lingkup administratif daerah (Halim, 2014). Capaian PAD tersebut menjadi refleksi atas derajat otonomi fiskal suatu wilayah, yang dalam implementasinya dipengaruhi oleh stabilitas ekonomi makro serta kapabilitas otoritas lokal dalam mengeksplorasi dan memanajemen sumber daya pendapatan secara efektif. UU No. 23 Tahun 2014 mengatakan pendapatan daerah diklasifikasikan sebagai seluruh arus masuk finansial dari berbagai instrumen yang berkontribusi pada peningkatan nilai bersihkekayaan bersih daerah. Pertumbuhan pendapatan daerah sangat dipengaruhi oleh efektivitas daerah dalam memanfaatkan potensi sumber keuangan lokal. Peningkatan kontribusi PAD terhadap penerimaan daerah bergantung pada kapasitas daerah untuk mengoptimalkan pengelolaan sumber daya ekonominya (Sebastiana dan Cahyo, 2016).

Dalam kerangka implementasi desentralisasi, otoritas daerah memiliki tanggung jawab holistik untuk mengakselerasi pembangunan lintas sektoral sebagai instrumen utama dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat. Mandat tersebut memberikan diskresi kepada pemerintah daerah untuk meregulasi serta memanajemen urusan internal maupun pelaksanaan tugas pembantuan secara otonom, selaras dalam Pasal 10 UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Regulasi ini mempertegas peran fundamental pemerintah daerah dalam memformulasikan tujuan pembangunan yang relevan dengan kebutuhan spesifik serta karakteristik sosio-ekonomi lokal.

2.1.2.2 Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah

PAD mencerminkan total pemasukan yang diterima langsung dari potensi perekonomian domestik suatu wilayah. Sesuai Permendagri No. 59 Tahun 2007, unsur-unsur PAD dibedakan menjadi empat kategori, yakni:

a. Pajak Daerah

Pajak daerah didefinisikan sebagai pungutan yang bersifat wajib kepada otoritas lokal guna mendanai fungsi pemerintahan serta akselerasi pembangunan daerah. Perspektif Mardiasmo (2016) menegaskan bahwa pajak daerah memuat banyak jenis pungutan yang dikelola secara otonom oleh pemerintah daerah dalam memperkuat postur fiskal serta menjamin keberlangsungan operasional pemerintahan di masing-masing yurisdiksi.

b. Retribusi Daerah

Unsur ini merujuk pada pungutan yang dibebankan dalam pemanfaatan layanan ataupun fasilitas tertentu yang disediakan pemerintah daerah, dengan memberikan kontraprestasi atau manfaat langsung kepada pembayarannya. Dalam struktur APBD, retribusi memegang peranan vital sebagai instrumen pendapatan setelah pajak, bahkan pada daerah-daerah tertentu, kontribusi retribusi mampu melampaui capaian penerimaan pajak daerah.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Pos pemasukan ini bersumber dari optimalisasi aset daerah yang penyertaannya terpisah dari struktur umum, mencakup penempatan modal pada BUMN, BUMD, maupun entitas swasta. Secara teknis, penerimaan ini umumnya berbentuk dividen atau distribusi laba atas investasi strategis yang dialokasikan oleh pemerintah daerah.

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Jenis ini mengakomodasi total penerimaan daerah yang belum terklasifikasi dari ketiga pos pendapatan sebelumnya. Sejalan dengan ketentuan UU Nomor 33 Tahun 2004 serta analisis Halim (2014), cakupan pendapatan ini meliputi instrumen finansial seperti pendapatan jasa giro,

perolehan bunga deposito, kompensasi ganti rugi atas kerusakan atau kehilangan aset daerah, serta denda akibat keterlambatan penyelesaian pengerjaan proyek.

2.1.2.3 Dana Perimbangan

Didefinisikan sebagai mekanisme distribusi anggaran yang berasal dari APBN kemudian diberikan pada pemerintah daerah guna memperkokoh penyelenggaraan desentralisasi fiskal. Sebagaimana dalam UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Dana ini menjadi komponen esensial dalam sistem TKD. Tujuan fundamental dari alokasi ini adalah untuk memitigasi disparitas fiskal antarwilayah sekaligus memastikan standarisasi serta pemerataan akses pelayanan publik di seluruh penjuru Indonesia. Dalam kerangka yuridis tersebut, Dana Perimbangan dikelompokkan ke dalam tiga kategori utama sebagai berikut:

a) Dana Bagi Hasil (DBH)

DBH didistribusikan kepada pemerintah daerah melalui mekanisme alokasi persentase tertentu dari pemasukan negara yang diekstraksi dari sektor perpajakan dan penggunaan SDA. Instrumen fiskal ini berfungsi sebagai bentuk kompensasi atas kontribusi ekonomi daerah terhadap pendapatan nasional, sekaligus sebagai upaya strategis dalam memperkuat kapasitas finansial bagi daerah penghasil maupun daerah non-penghasil. Mengacu pada aturan yang berlaku pada Pasal 34 UU No. 1 Tahun 2022, struktur DBH secara yuridis dikelompokkan ke dalam dua kategori fundamental, yakni:

- 1) DBH Pajak, yang meliputi distribusi penerimaan dari sektor PBB, BPHTB, serta PPh Pasal 21 dan Pajak Rokok.
- 2) DBH SDA, yang mengintegrasikan perolehan daerah dari berbagai sektor ekstraktif dan hayati, mencakup bidang kehutanan, pertambangan umum, minyak bumi, gas alam, energi panas bumi, serta sektor perikanan.

Dengan pembagian tersebut, DBH diharapkan mampu memperkuat kapasitas fiskal daerah serta menyeimbangkan kontribusi daerah terhadap penerimaan negara dengan manfaat yang diterima daerah.

b) Dana Alokasi Umum (DAU)

DAU memiliki fungsi pemerataan kemampuan keuangan antardaerah. DAU ditetapkan melalui formulasi yang menitikberatkan pada celah fiskal. Dengan demikian, DAU diberikan sebagai dana yang tidak dibatasi penggunaannya dan disesuaikan dengan prioritas daerah, namun tetap diarahkan untuk mendukung pelayanan dasar publik.

c) Dana Alokasi Khusus (DAK)

DAK disediakan bagi daerah tertentu untuk pendanaan aktivitas yang menjadi prioritas nasional tetapi menjadi kewenangan daerah. DAK terdiri dari DAK Fisik yang ditujukan untuk pembangunan infrastruktur (seperti pendidikan, kesehatan, dan transportasi), serta DAK Nonfisik yang mendukung operasional pelayanan publik, misalnya tunjangan guru dan bantuan operasional kesehatan.

2.1.3 Belanja Modal

Berdasarkan perspektif Musgrave (1959) dalam teori fungsi alokasi, otoritas publik memegang peranan sentral dalam penyediaan barang dan jasa publik melalui mekanisme belanja negara atau daerah. Alokasi anggaran ini secara garis besar terbagi menjadi belanja operasional (rutin) dan belanja modal. Sebagaimana dikemukakan oleh Halim (2014), belanja modal termasuk dalam kategori pengeluaran produktif yang berorientasi pada perolehan kekayaan tetap, diantaranya penyediaan sarana dan prasarana transportasi, jembatan, serta fasilitas publik di sektor kesehatan dan pendidikan, yang diproyeksikan memberikan kemanfaatan dalam jangka panjang secara berkelanjutan.

Perspektif Darwanto (2015) mengemukakan bahwa peningkatan proporsi belanja modal dalam struktur APBD merefleksikan komitmen strategis pemerintah daerah untuk memprioritaskan alokasi anggaran pada agenda pembangunan yang bersifat akseleratif terhadap pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Berdasarkan tinjauan Mahmudi (2016), belanja modal didefinisikan

sebagai alokasi pengeluaran otoritas daerah yang memiliki masa manfaat lintas periode atau melampaui satu tahun anggaran. Pengeluaran ini berimplikasi langsung pada peningkatan nilai aset tetap serta akumulasi kekayaan daerah, di mana perolehan aset tersebut diproyeksikan secara spesifik untuk mengoptimalkan kualitas distribusi pelayanan kepada publik.

Pengalokasian belanja modal yang tepat sangat krusial karena berkaitan langsung dengan penyediaan infrastruktur publik. Menurut Darise (2009), proporsi belanja modal terhadap keseluruhan belanja daerah dapat dipergunakan guna menilai keserasian anggaran, di mana daerah diharapkan tidak hanya menghabiskan anggaran untuk belanja operasional (rutin), tetapi juga untuk investasi jangka panjang dalam bentuk sarana dan prasarana.

Menurut Mahmudi (2016), rasio belanja modal bisa dihitung dengan membandingkan total Belanja Modal terhadap total Belanja Daerah, yang diformulasikan yaitu:

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\% \quad (2.3)$$

Menurut Mahmudi (2019), belanja modal memiliki beberapa karakteristik utama yang membedakannya dari belanja operasional, yaitu:

1. Manfaat Melebihi Satu Tahun Anggaran

Belanja modal menghasilkan aset atau infrastruktur yang manfaatnya tidak hanya dirasakan pada tahun anggaran berjalan, melainkan berlanjut untuk periode-periode berikutnya.

2. Memperbanyak Aset atau Kekayaan Daerah

Setiap pengeluaran belanja modal dicatat sebagai penambahan aset tetap dalam neraca pemerintah daerah. Dengan demikian, belanja modal meningkatkan nilai kekayaan daerah yang dapat dimanfaatkan sebagai penunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat.

3. Tidak Habis Dipakai dalam Satu Periode

Berbeda dengan belanja barang dan jasa yang habis digunakan dalam satu tahun anggaran, belanja modal menghasilkan aset yang tidak langsung

habis atau musnah setelah digunakan. Misalnya, pembelian kendaraan dinas atau pembangunan rumah sakit yang bisa dipakai bertahun-tahun.

4. Menghasilkan Pelayanan Publik Secara Berkesinambungan

Belanja modal dimaksudkan untuk menyediakan infrastruktur dan sarana pendukung aktivitas masyarakat secara berkelanjutan. Contohnya pembangunan jaringan irigasi yang terus digunakan untuk menunjang kegiatan pertanian dan meningkatkan kesejahteraan petani.

Sesuai dengan Permendagri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja modal dikelompokkan ke dalam lima kategori utama.

1) Belanja Modal Tanah

Dikategorikan sebagai pengeluaran untuk mendapatkan tanah melalui pembelian, pertukaran, pemberian, atau cara sah lainnya, yang bertujuan mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan. Contoh: akuisisi lahan untuk pembangunan gedung pemerintah atau area hijau terbuka.

2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Digunakan dalam rangka membeli atau menambah instrumen serta perangkat yang mendukung pelayanan publik. Contoh: pengadaan komputer untuk perkantoran, alat kesehatan untuk rumah sakit daerah, atau mesin pemadam kebakaran.

3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Diperuntukkan bagi pembangunan maupun perbaikan gedung dan bangunan milik pemerintah daerah. Contoh: pembangunan sekolah, kantor kelurahan, puskesmas, atau balai pertemuan masyarakat.

4) Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Digolongkan sebagai belanja dalam rangka pembangunan infrastruktur transportasi dan jaringan penunjang lainnya.

5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Kategori ini meliputi belanja untuk aset yang tidak tergolong dalam empat klasifikasi sebelumnya, tetapi tetap memiliki manfaat jangka panjang. Contoh: pengadaan buku perpustakaan daerah, koleksi museum, atau peralatan seni dan budaya.

2.1.4 Pengeluaran Pemerintah

Diartikan sebagai alokasi dana dari kas umum daerah yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan belanja pemerintahan dalam suatu periode tertentu. Pengeluaran ini bersifat wajib dan tidak menghasilkan pengembalian langsung kepada pemerintah daerah, sehingga dikategorikan sebagai belanja publik. Secara fungsional, pengeluaran pemerintah merupakan instrumen utama dalam pengelolaan ekonomi daerah. Pemerintah mengendalikan pertumbuhan ekonomi melalui pengaturan penerimaan dan pengeluaran negara (APBN) dan daerah (APBD). Kebijakan pengeluaran pemerintah bertujuan menstabilkan ekonomi melalui pengendalian harga, peningkatan produksi, dan perluasan lapangan kerja, demi menciptakan kondisi ekonomi yang sehat dan berkelanjutan.

Berdasarkan kerangka regulasi dalam Permendagri No. 13 Tahun 2006, struktur belanja daerah dikotomikan menjadi dua kategori utama. Pertama, belanja tidak langsung yang dialokasikan tanpa korelasi linier dengan penyelenggaraan program ataupun aktivitas tertentu, yang mencakup belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan finansial, serta belanja tidak terduga. Kedua, belanja langsung yaitu beban anggaran yang secara spesifik berkontribusi terhadap implementasi program dan kegiatan pembangunan, yang secara operasional mencakup belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta investasi dalam bentuk belanja modal.

Belanja daerah ialah pengeluaran pemerintah dalam periode anggaran. Untuk dapat menggunakan belanja daerah tersebut didahulukan dalam melaksanakan kegiatan pemerintah sebagai kebijakan daerah. Yang terdiri dari kegiatan yang bersifat wajib serta pilihan sesuai dengan aturan perundangan (Halim, 2014).

Berdasarkan UU No.58 Tahun 2005 tentang keuangan daerah, belanja daerah diartikan sebagai kewajiban pemerintah daerah untuk mengurangi total kekayaan bersih yang diperoleh daerah. Mangkoesoebroto (2003) mengatakan pengeluaran pemerintah adalah cerminan dari kebijakan yang dibuat pemerintah yang diharuskan untuk dikeluarkan untuk membeli suatu barang dan jasa sesuai yang tertuang dalam kebijakan tersebut. Berdasarkan hukum pengeluaran pemerintah yang digagas oleh Adolf Wagner dengan seiring dengan majunya

masyarakat maka akan meningkatkan jumlah populasi penduduk sehingga akan meningkatkan kebutuhan masyarakat dan kegiatan dari pengeluaran pemerintah juga terdapat peningkatan.

Dalam kajian makroekonomi, pengeluaran pemerintah dibagi ke dalam beberapa kategori utama yang masing-masing memiliki karakteristik serta dampak tersendiri terhadap aktivitas ekonomi:

1. Belanja untuk Barang dan Jasa

Diartikan sebagai pengeluaran pemerintah yang bertujuan memperoleh barang maupun layanan yang diperlukan guna melaksanakan fungsi pemerintahan bahkan melayani publik.

2. Pengeluaran untuk Gaji Pegawai

Alokasi anggaran untuk kompensasi tenaga kerja pemerintah berpengaruh secara tidak langsung terhadap aktivitas ekonomi makro. Perubahan dalam jumlah gaji akan memengaruhi daya beli publik yang pada gilirannya berimplikasi kepada taraf permintaan agregat.

3. Transfer Payment

Transfer payment adalah bentuk pengeluaran pemerintah yang tidak melibatkan pembelian barang atau jasa di pasar. Jenis pengeluaran ini mencakup pembayaran kepada individu atau kelompok masyarakat, seperti subsidi, bantuan sosial langsung, pensiun, dan bunga utang pemerintah kepada masyarakat. Secara ekonomi, pengeluaran transfer memiliki dampak yang setara dengan belanja gaji pegawai karena turut mempengaruhi tingkat pendapatan dan konsumsi, meskipun berbeda dari sisi administratif.

2.2 Penelitian Terdahulu

Studi yang dipublikasikan Asmara dan Suci (2014) dengan judul “Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Banten” mengkaji korelasi antara otonomi fiskal dengan prevalensi kemiskinan pada enam yurisdiksi kabupaten/kota di Banten sepanjang 2001–2011. Dengan mengaplikasikan metode regresi data panel menggunakan pendekatan *Fixed Effect Model (FEM)*, studi ini memposisikan persentase penduduk miskin sebagai variabel terikat. Kemudian, determinan independen

yang dipergunakan mencakup rasio PAD (RPAD), rasio Dana Perimbangan (RDP), indeks Gini, dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TP). Temuan empiris mengindikasikan bahwa RPAD, ketidakseimbangan pemasukan, serta pengangguran berkontribusi positif pada kemiskinan, sedangkan RDP menunjukkan pengaruh negatif. Hal ini menegaskan bahwa penguatan kemandirian fiskal belum secara otomatis mereduksi kemiskinan akibat hambatan struktural berupa disparitas pendapatan dan rendahnya penyerapan tenaga kerja.

Fakhirah Wulandari (2021) berjudul "Pengaruh Kemandirian Fiskal terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur Tahun 2015–2019" bertujuan untuk melaksanakan analisis terhadap hubungan antara tingkat kemandirian fiskal dan tingkat kemiskinan di wilayah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Pada temuan ini, variabel independen yang dipergunakan adalah kemandirian fiskal, sementara variabel dependen yang dianalisis adalah tingkat kemiskinan. Metode analisis yang diterapkan ialah regresi data panel menggunakan pendekatan *Fixed Effect Model (FEM)*. Temuan ini mengindikasikan adanya hubungan negatif yang signifikan antara kemandirian fiskal dan tingkat kemiskinan. Kemandirian fiskal berperan strategis dalam mendukung efektivitas program pengentasan kemiskinan, karena daerah dengan kapasitas fiskal yang kuat cenderung lebih mampu merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan yang relevan dengan kondisi dan kebutuhan lokal.

Penelitian yang dilakukan oleh Arnaldi dan Irdha Yusra (2021) berjudul "Analisis Pengaruh Kemandirian Fiskal dan Belanja Daerah terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015–2019" bertujuan untuk mengevaluasi pengaruh kemandirian fiskal serta belanja daerah terhadap tingkat kemiskinan pada 19 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat. Dalam studi ini, kemandirian fiskal dan belanja daerah ditetapkan sebagai variabel independen, sedangkan tingkat kemiskinan berfungsi sebagai variabel dependen. Metode analisis yang digunakan adalah regresi data panel dengan pendekatan *Fixed Effect Model (FEM)*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemandirian fiskal memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan, yang berarti semakin tinggi tingkat kemandirian fiskal suatu daerah, maka semakin rendah tingkat kemiskinan yang terjadi. Sementara itu, variabel

belanja daerah berdampak positif tetapi tidak signifikan terhadap kemiskinan, yang membuktikan bahwa alokasi belanja publik belum sepenuhnya optimal dalam mendukung program-program penanggulangan kemiskinan di wilayah tersebut.

Penelitian yang dilakukan oleh Sodik Dwi Purnomo dan Krisnhoe Sukma Danuta (2022) dengan judul "Analisis Kemampuan Keuangan Daerah terhadap Kemiskinan: Studi Empiris di Sumatera Utara" bertujuan untuk menganalisis pengaruh sejumlah indikator kemampuan fiskal daerah terhadap tingkat kemiskinan. Variabel independen dalam penelitian ini terdiri dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD), Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF), dan Pengeluaran Pemerintah di bidang Kesehatan (PPK), dengan tingkat kemiskinan sebagai variabel dependen. Metode analisis yang diterapkan ialah regresi linier berganda berbasis data panel melalui pendekatan FEM. Hasil temuan membuktikan variabel RKKD dan DDF tidak mempengaruhi tingkat kemiskinan secara signifikan. Sebaliknya, variabel PPK berdampak negatif serta signifikan yang menandakan peningkatan alokasi anggaran pemerintah daerah untuk sektor kesehatan secara nyata berkontribusi dalam menurunkan tingkat kemiskinan. Temuan ini menegaskan pentingnya peran intervensi pemerintah dalam penyediaan layanan dasar, khususnya di sektor kesehatan, sebagai instrumen strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan, terutama di daerah dengan kapasitas fiskal yang terbatas.

Penelitian yang dilakukan oleh Frederick Winston Nalle dan Margaretha Diana Pangastuti (2023) berjudul "*Determinants of Regional Financial Performance and Poverty Level in North Central Timor Regency*" bertujuan untuk mengevaluasi kinerja keuangan daerah serta pengaruhnya pada tingkat kemiskinan di Kabupaten Timor Tengah Utara sepanjang 2001–2020. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas kemandirian keuangan, ketergantungan keuangan, dan desentralisasi fiskal, sedangkan variabel dependennya adalah tingkat kemiskinan. Pendekatan yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan teknik analisis regresi linier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan daerah tergolong rendah, yang tercermin dari tingginya ketergantungan terhadap sumber pendapatan eksternal. Peningkatan

kemandirian keuangan dan desentralisasi fiskal, serta penurunan tingkat ketergantungan keuangan, berkontribusi terhadap penurunan angka kemiskinan. Adapun perbedaannya terletak pada cakupan wilayah dan rentang waktu penelitian, di mana studi ini secara khusus meneliti Kabupaten Timor Tengah Utara dalam kurun waktu dua dekade terakhir.

2.2 Hubungan Antar Variabel

Berdasarkan telaah pustaka serta hasil studi sebelumnya yang sudah disampaikan, maka keterkaitan antara variabel independen dan variabel dependen dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Hubungan Kemandirian Keuangan Daerah (KKD) terhadap Tingkat Kemiskinan.

Hubungan antara KKD dan kemiskinan dalam literatur menunjukkan hasil yang beragam (*mixed results*). Penelitian Fakhirah Wulandari (2021) serta Arnaldi dan Irdha Yusra (2021) di Sumatera Barat membuktikan bahwa KKD berpengaruh negatif dan signifikan, yang berarti peningkatan kemampuan daerah untuk mengelola PAD akan memperkuat kapasitas fiskal untuk membiayai program pengentasan kemiskinan secara mandiri. Namun, penelitian Alla Asmara dkk (2014) justru menunjukkan hasil positif karena adanya kendala struktural. Dalam penelitian ini, KKD diposisikan sebagai cerminan kemampuan daerah untuk tidak bergantung pada pusat dalam mengintervensi masalah kemiskinan di tingkat lokal.

2. Hubungan Pengeluaran Pemerintah Daerah (PPD) terhadap Tingkat Kemiskinan

Pengeluaran pemerintah merupakan instrumen fiskal utama untuk menstimulasi ekonomi dan kesejahteraan. Sejalan pandangan Sodik Dwi Purnomo dkk (2022) yang menunjukkan bahwa alokasi pengeluaran (khususnya sektor kesehatan) berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan. Secara teoritis, semakin besar alokasi pengeluaran pemerintah yang tepat sasaran pada sektor pelayanan dasar, maka beban pengeluaran masyarakat miskin akan berkurang, sehingga secara langsung dapat menurunkan angka kemiskinan. PPD dalam

penelitian ini mencakup totalitas belanja daerah dengan harapan dapat memperluas lapangan pekerjaan bahkan mengoptimalkan daya beli publik.

3. Hubungan Belanja Modal (BM) terhadap Tingkat Kemiskinan

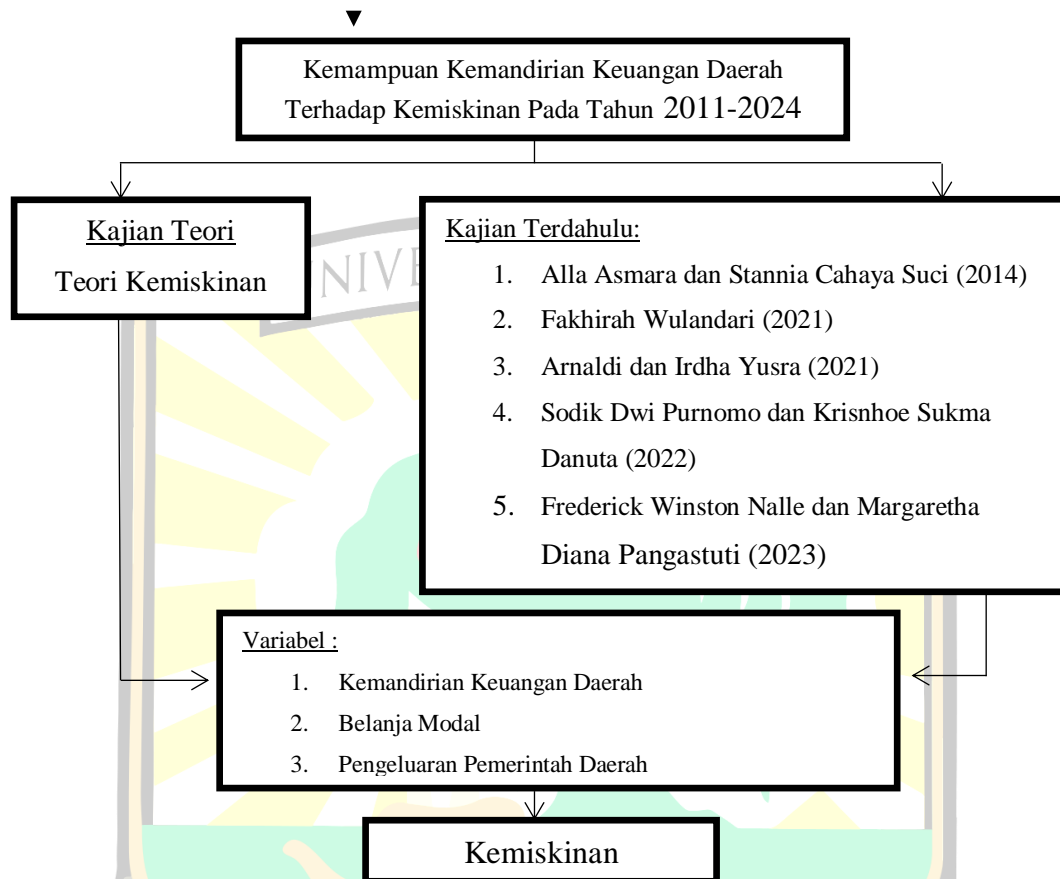
Belanja Modal diartikan sebagai komponen dari belanja daerah yang dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur jangka panjang. Hubungannya dengan kemiskinan bersifat tidak langsung melalui penciptaan aksesibilitas ekonomi. Walaupun penelitian Arnaldi dan Irdha Yusra (2021) menunjukkan belanja daerah secara umum belum optimal, secara teoritis belanja modal yang ditujukan pada pembangunan infrastruktur publik (misalnya jalan dan irigasi) akan menurunkan biaya logistik dan meningkatkan produktivitas masyarakat miskin. Penelitian ini ingin menguji apakah alokasi belanja modal di Sumatera Barat sudah bersifat pro-poor atau justru belum menyentuh sasaran penduduk miskin secara langsung.

4. Hubungan Secara Simultan (Bersama-sama)

Secara komprehensif, variabel KKD, PPD, dan BM merupakan satu kesatuan kebijakan fiskal daerah. Penelitian Nalle dan Pangastuti (2023) membuktikan bahwa kinerja keuangan daerah secara simultan mempengaruhi dinamika kemiskinan. Hubungan ini mengindikasikan bahwa kemampuan daerah dalam menghasilkan pendapatan (KKD), yang kemudian dialokasikan dalam bentuk belanja operasional (PPD) dan pembangunan fisik (BM), akan menentukan seberapa efektif pemerintah daerah dalam menekan laju kemiskinan di wilayahnya.

2.3 Kerangka penelitian

Untuk meningkatkan pemahaman, kerangka pemikiran ini akan disajikan secara visual dalam bentuk gambar.



Sumber : Penulis, diolah dari Literatur Review, 2025

Gambar 2.1 Kerangka Penelitian

2.4 Hipotesis Penelitian

Mengacu pada permasalahan penelitian, peneliti merumuskan hipotesis menurut permasalahan yang dikaji.

H1: Diduga kemandirian keuangan daerah, belanja modal, dan pengeluaran pemerintah daerah secara parsial berpengaruh terhadap kemiskinan pada Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat tahun 2011-2024.

H2: Diduga kemandirian keuangan daerah, belanja modal, dan pengeluaran pemerintah daerah secara simultan berpengaruh terhadap kemiskinan pada Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat tahun 2011-2024.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Metodologi yang dipergunakan ialah kuantitatif. Merujuk pada pemikiran Sugiyono (2018), pendekatan ini bersandar pada aliran positivisme yang bertujuan untuk mengobservasi kelompok populasi ataupun sampel tertentu. Data dikumpulkan secara sistematis melalui instrumen terukur, di mana data tersebut diolah melalui prosedur kuantitatif atau statistika untuk menarik kesimpulan yang mampu membuktikan atau menggugurkan hipotesis penelitian.

Pendekatan kuantitatif dipilih untuk memverifikasi secara statistik dampak variabel independen (KKD, PPD, dan BM) terhadap kemiskinan pada tingkat kabupaten/kota di Sumatera Barat. Studi ini menggunakan desain data panel, yang memadukan observasi lintas wilayah (*cross-section*) sebanyak 19 entitas pemerintah daerah dan observasi deret waktu (*time-series*) pada periode 2011–2024, guna memperoleh analisis yang lebih komprehensif.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Jenis data temuan ini ialah data sekunder yang bersumber dari website BPS Sumatera Barat dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK). Data tersebut terdiri dari data kemiskinan, kemandirian keuangan daerah, belanja modal, serta pengeluaran pemerintah daerah di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2011-2024. Penelitian ini mencakup 19 Kota/Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat, dimana data dari daerah tersebut akan dianalisis untuk memecahkan permasalahan dan memperoleh tujuan yang diinginkan.

3.3 Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional diartikan sebagai penjelasan terkait strategi peneliti mengukur dan mendefinisikan variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini secara spesifik. Hal ini bertujuan agar terdapat pemahaman yang selaras dan menghindari ambiguitas dalam interpretasi data statistik yang akan diolah. Adapun variabel studi ini didefinisikan secara operasional antara lain:

1. Kemiskinan (Variabel Dependen - Y)

Kemiskinan dipandang sebagai sebuah peristiwa multidimensional yang merefleksikan ketidakmampuan individu atau rumah tangga secara ekonomi dalam mencukupi kebutuhan dasar minimal, baik dari aspek makanan ataupun bukan makanan, di mana pengukurannya menggunakan pendekatan pengeluaran. Operasionalisasi variabel ini menggunakan Persentase Penduduk Miskin, yakni perbandingan antara jumlah penduduk yang mempunyai rerata pengeluaran/kapita/bulan di bawah garis kemiskinan terhadap total jumlah penduduk di suatu wilayah. Data tersebut adalah data sekunder yang dipublikasikan secara resmi oleh BPS Provinsi Sumatera Barat, yang dinyatakan dalam satuan persen (%) dan mencakup 19 Kabupaten/Kota selama periode pengamatan 2011–2024.

2. Kemandirian Keuangan Daerah (Variabel Independen - X1)

KKD merepresentasikan tingkat kemandirian fiskal pemerintah daerah dalam mendanai tugas-tugas pemerintahan, penyelenggaraan pembangunan, dan pemberian layanan publik tanpa menggantungkan diri sepenuhnya pada bantuan dana transfer dari pemerintah pusat. Pengukuran variabel itu melalui RKKD yang secara teknis diperhitungkan melalui membandingkan jumlah PAD terhadap total pendapatan daerah. Semakin tingginya rasio ini, maka makin besar kapasitas daerah dalam menentukan arah kebijakan pengentasan kemiskinan secara mandiri sesuai potensi lokalnya. Data tersebut berasal dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang diterima melalui DJPK atau BPS, dinyatakan dalam satuan persen (%).

3. Pengeluaran Pemerintah Daerah (Variabel Independen - X2)

Pengeluaran Pemerintah Daerah (PPD) diartikan sebagai seluruh kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan untuk membiayai berbagai urusan pemerintahan. Dalam penelitian ini, PPD mencerminkan besarnya alokasi total belanja daerah yang diwujudkan pemerintah kabupaten/kota di Sumatera Barat untuk menjalankan fungsi pelayanan publik, seperti sektor pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Variabel ini mengukur seberapa besar dukungan finansial

pemerintah dalam menciptakan stabilitas ekonomi dan penyediaan fasilitas dasar yang dapat diakses oleh masyarakat luas. Data ini dinyatakan dalam satuan nilai nominal mata uang Rupiah (Rp) berdasarkan data realisasi belanja yang tercatat dalam dokumen APBD di setiap wilayah kabupaten/kota selama masa penelitian.

4. Belanja Modal (Variabel Independen - X3)

BM didefinisikan sebagai pengeluaran anggaran yang dikhususkan untuk mendapatkan aset tetap serta aset lainnya yang mempunyai masa kegunaan melebihi satu periode akuntansi serta bertujuan untuk memperkuat ketersediaan infrastruktur publik di daerah. Secara operasional, belanja modal dalam penelitian ini mencerminkan investasi pemerintah daerah dalam pengadaan aset fisik berupa pembangunan jalan, jembatan, irigasi, gedung sekolah, serta fasilitas kesehatan yang secara teoritis diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi serta mempermudah aksesibilitas bagi penduduk miskin.

3.4 Model Penelitian

Studi ini menerapkan analisis data panel yang menggabungkan data berkala dan data silang. Dalam data berkala penelitiannya berdasarkan kesesuaian waktu, sedangkan data silang diambil pada waktu 2011-2024.

Berikut persamaan model regresi data panel dapat dirumuskan yaitu: (Madany dkk., 2022):

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + e_{it} \quad (3.2)$$

Berdasarkan persamaan dasar dari model data panel tersebut, maka penelitian ini menggunakan model yang dirumuskan sebagai berikut:

$$Kemiskinan_{it} = \beta_0 + \beta_1 KKD_{it} + \beta_2 BM_{it} + \beta_3 PPD_{it} + e_{it} \quad (3.2)$$

Dimana:

$Kemiskinan_{it}$: Tingkat Kemiskinan (%)

β_0 : Nilai Konstanta

β_{1-3} : Koefisien Regresi

KKD_{it} : Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (%)

BM_{it} : Tingkat Belanja Modal (%)

PPD_{it} : Tingkat Pengeluaran Pemerintah Daerah (%)

i	: Banyaknya Observasi
t	: Rentang Waktu (2011-2024)
e_{it}	: Error Term

3.5 Teknik Analisis Data

Studi ini menerapkan data sekunder yang mencakup informasi mengenai tingkat kemiskinan, tingkat kemandirian keuangan daerah, belanja modal, serta pengeluaran pemerintah daerah pada tingkat Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat. Sumber data didapatkan dari publikasi resmi BPS dan DJPK, serta lembaga terkait lainnya yang memiliki keterkaitan substansial dengan lingkup dan tujuan penelitian ini.

Teknik analisis data yang dipergunakan ialah regresi data panel, yang menjadi metode analisis kuantitatif dengan mengkombinasikan data *time series* dan *cross section*. Data diolah dengan berbantuan software statistik Stata. Pendekatan ini sejalan dengan metode yang lazim dipergunakan dalam studi ekonomi regional berbasis data panel sebagaimana dikemukakan oleh Gujarati dan Porter (2012) serta Baltagi (2005).

3.5.1 Pemilihan Model Data Panel

Menurut Gujarati (2004), dalam estimasi model regresi melalui data panel, terdapat tiga pendekatan utama yang dapat digunakan untuk menganalisis hubungan antar variabel, masing-masing dengan karakteristik metodologis tersendiri dalam menangkap dinamika data lintas waktu dan individu.

1. *Common Effect Model*

Model ini adalah pendekatan paling sederhana dalam analisis data panel. Dengan mengkombinasikan data *cross-section* dan *time series*, diasumsikan koefisien regresi bersifat tetap sepanjang waktu dan antar unit individu. Artinya, karakteristik perilaku tiap entitas dianggap konstan, tidak mengalami perubahan selama observasi. Estimasi model dilaksanakan melalui metode *Ordinary Least Square (OLS)* ataupun teknik kuadrat paling kecil.

2. *Fixed Effect Model*

Metode ini merupakan pendekatan model yang mengasumsikan bahwa koefisien slope bersifat tetap, sementara nilai intercept dapat berbeda antar individu. Untuk mengestimasi terhadap data panel, pendekatan FEM melalui penggunaan teknik variabel *dummy*, yang dikenal pula dengan istilah *Least Squares Dummy Variable (LSDV)*.

3. *Random Effect Model*

Model ini melihat hubungan dari variabel gangguan antar waktu serta individu. Analisis data panel ini menerapkan model efek acak guna menangani heteroskedastisitas dan memperhitungkan error cross-section dan time series. *ECM (Error Component Model)* adalah sebutan yang biasa dipakai untuk model ini.

3.5.2 Uji Model

Pemilihan model analisis data panel yang tepat membutuhkan beberapa pengujian, diantaranya:

1. Uji Chow

Tujuannya ialah menetapkan model yang paling tepat antara CEM dan FEM dalam analisis data panel. Jika nilai probabilitas < 0.05 , maka H_0 yang mengatakan CEM ditolak, dan model yang lebih sesuai adalah *fixed effect*, karena terdapat perbedaan signifikan antara unit begitu juga sebaliknya, jika nilai probabilitas > 0.05 , maka hipotesis nol (H_0) diterima, yang berarti CEM dianggap cukup untuk merepresentasikan data panel yang digunakan.

Dengan kata lain:

H_0 : *Common Effect Model*

H_1 : *Fixed Effect Model*

2. Uji Hausman

Pengujian ini dapat dipergunakan ketika akan memilih antara FEM atau REM yang paling tepat atau yang lebih baik yang dapat digunakan dalam perkiraan di dalam data panel. Jika probabilitas < 0.05 , maka H_0 yang mengatakan REM adalah tepat ditolak, sehingga model yang lebih sesuai ialah FEM

begitu juga sebaliknya, apabila probabilitas > 0.05 , maka H_0 diterima, menandakan bahwa tidak terdapat korelasi yang signifikan, sehingga REM terpilih jadi model terbaik.

Dengan kata lain:

H_0 : *Random Effect Model*

H_1 : *Fixed Effect Model*

3. Uji Lagrange Multiplier

Pengujian ini dapat dipergunakan pada saat akan memilih antara REM atau CEM sebagai yang paling terbaik atau yang paling tepat dalam sebuah perkiraan data panel. Ketika probabilitas dari *Breusch-Pagan* $< 0,05$, maka model yang tepat yaitu REM atau H_0 ditolak, sementara itu ketika probabilitas dari *Breusch-Pagan* $> 0,05$, maka H_1 ditolak atau model yang tepat digunakan ialah CEM.

Dengan kata lain:

H_0 : *Common Effect*

H_1 : *Random Effect Model*

3.5.3 Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Pengujian ini merupakan uji mengenai kenormalan distribusi data. Pelaksanaannya bertujuan guna mengetahui data yang dianalisis normal ataukah tidak. Bila distribusinya mendekati normal atau benar-benar normal, maka disebut baik model regresi tersebut. Normalnya distribusi suatu model regresi yakni bila nilai signifikan value JB bernilai ≥ 0.05 ($\alpha = 0.05$). Sebaliknya, bila nilai signifikan value bernilai < 0.05 sehingga tidak normal distribusi data tersebut.

2. Uji Multikolinearitas

Multikolinieritas ialah adanya hubungan linier yang akan membuktikan apakah memiliki atau terdapat hubungan yang kuat. Untuk mengidentifikasi ada atau tidaknya indikasi dari multikolinearitas yaitu dapat menerapkan nilai VIF, apabila nilai VIF < 10 , maka multikolinieritas tidak terjadi, maka model yang dapat dihasilkan dianggap baik guna mengetahui pengaruhnya dari variabel variabel independent terhadap variabel tak bebas. Dan sebaliknya jika VIF > 10

sehingga menyimpulkan timbul gangguan pada multikolinearitas pada model regresi.

3. Uji Heteroskedastisitas

Pengujian ini dapat menggunakan uji Glejser. Apabila bernilai sig. < 0.05 sehingga menyimpulkan heteroskedastisitas tidak terjadi, tetapi apabila nilai sig. > 0.05 akan menimbulkan heteroskedastisitas.

3.5.4 Uji Signifikansi

1. Uji-t

Tujuannya ialah mengetahui seberapa berpengaruh variabel independent terhadap dependen secara parsial. Selain itu, bertujuan melihat apakah variabel independen memberikan pengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Secara teknis, Uji-t menghitung nilai statistik dari tiap koefisien regresi, dan menguji apakah nilai tersebut secara signifikan berbeda dari nol. Nilai probabilitas (t-Prob) yang diperoleh menjadi acuan dalam pengambilan keputusan:

- Jika t-Prob < 0.05 , sehingga variabel independent terbukti mempengaruhi variabel dependennya secara signifikan, dan H_0 ditolak.
- Jika t-Prob > 0.05 , maka pengaruh variabel tidak signifikan, sehingga H_0 diterima.

Dengan demikian, rumusan hipotesisnya ialah:

- H_0 : Tidak terdapat pengaruh signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen.
- H_1 : Terdapat pengaruh signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen.

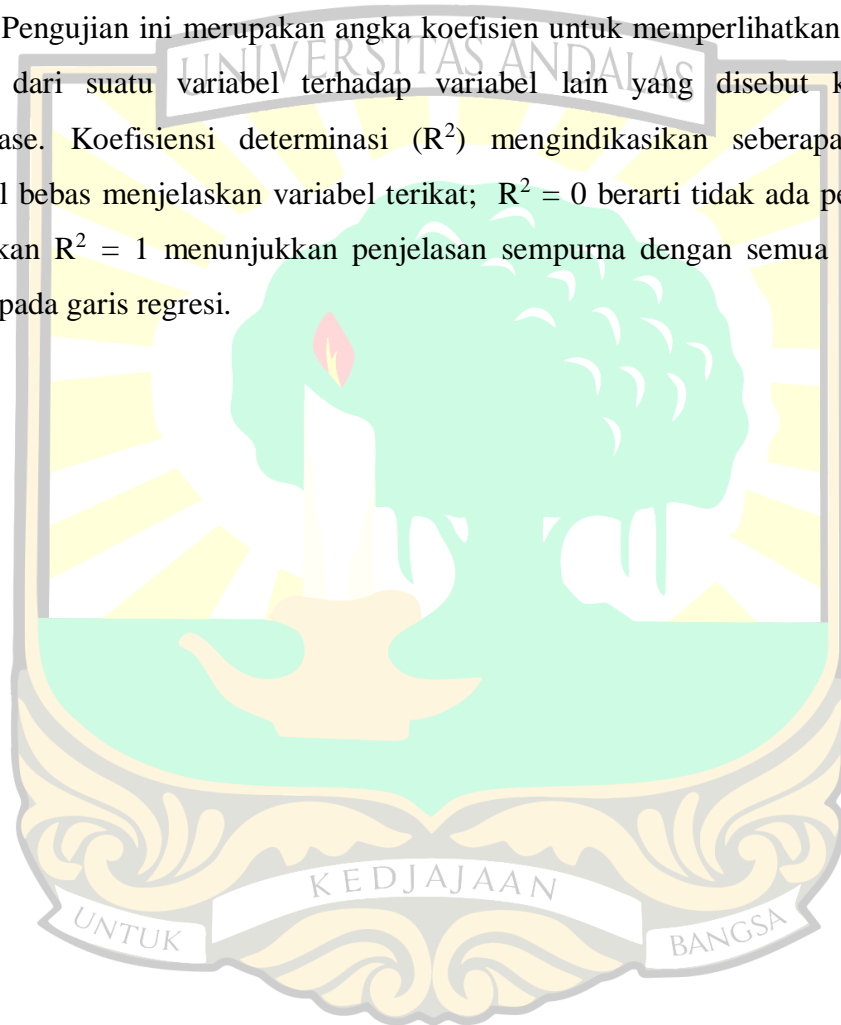
2. Uji F

Tujuannya ialah melihat apakah semua variabel independent dalam suatu model regresi berdampak secara bersamaan dalam menjelaskan variabel terikatnya. Uji ini penting dalam menentukan signifikansi kolektif dari model regresi yang digunakan. Pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan tingkat signifikansi (nilai p-value) dari uji F:

- Jika signifikansi < 0.05 , maka H_0 ditolak yang menandakan adanya dampak signifikan dari seluruh variabel bebas terhadap variabel terikat secara simultan.
- Apabila signifikansi > 0.05 , sehingga H_0 diterima, yang berarti variabel independent tidak mempengaruhi variabel dependennya secara bersamaan.

3. Uji Koefisien Determinasi (*Adjusted R²*)

Pengujian ini merupakan angka koefisien untuk memperlihatkan besarnya variasi dari suatu variabel terhadap variabel lain yang disebut ke dalam persentase. Koefisien determinasi (R^2) mengindikasikan seberapa mampu variabel bebas menjelaskan variabel terikat; $R^2 = 0$ berarti tidak ada penjelasan, sedangkan $R^2 = 1$ menunjukkan penjelasan sempurna dengan semua observasi berada pada garis regresi.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Perkembangan Variabel Penelitian

Provinsi Sumatera Barat menjadi salah satu provinsi di Indonesia yang berada di wilayah pesisir barat bagian tengah Pulau Sumatera. Provinsi ini mempunyai luas wilayah kisaran 42.012,89 km², dengan Kota Padang sebagai pusat pemerintahan sekaligus ibu kota provinsi. Secara geografis, Sumatera Barat berada pada posisi 98°36'–101°53' BT dan 0°54' LU hingga 3°30' LS. Karakteristik topografi wilayah ini didominasi oleh dataran tinggi vulkanik yang menjadi bagian dari jajaran Pegunungan Bukit Barisan, serta wilayah dataran rendah yang terbentang di sepanjang garis pantai barat (BPS Sumatera Barat, 2024).

Provinsi Sumatera Barat secara administrative mempunyai 19 daerah otonom yang mencakup 12 kabupaten dan 7 kota. Struktur pemerintahan di provinsi ini terbagi ke dalam 179 kecamatan, 760 nagari, 231 kelurahan, dan 126 desa. Kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan satu-satunya wilayah yang tidak menerapkan sistem pemerintahan nagari, melainkan hanya menggunakan struktur pemerintahan desa sebagai unit administrasi terendah. Hal itu tidak sama dengan kabupaten lain di Sumatera Barat yang pada umumnya mengadopsi sistem nagari sebagai bentuk pemerintahan lokal yang mencerminkan identitas sosial dan budaya masyarakat Minangkabau (BPS Sumatera Barat, 2024).

Provinsi Sumatera Barat memiliki batas wilayah administratif yang meliputi Provinsi Sumatera Utara di sebelah utara, Provinsi Bengkulu di selatan, serta Provinsi Jambi dan Riau di bagian timur. Di sisi barat, provinsi ini berbatasan langsung dengan perairan Samudera Hindia. Dengan cakupan wilayah yang relatif luas, sekitar 45,17% dari total luas wilayah Sumatera Barat merupakan kawasan hutan lindung. Kondisi ini mencerminkan tingginya tingkat tutupan lahan vegetatif yang memainkan peran penting sebagai penyangga fungsi ekologis di kawasan tersebut (BPS, 2024).

Selain itu, provinsi ini juga mempunyai garis pantai sepanjang 2.420,357 km dan luas perairan laut mencapai 186.580 km², yang berkontribusi pada sektor kelautan dan perikanan sebagai salah satu potensi ekonomi daerah. Kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan daerah dengan luas wilayah terbesar, yakni 6.011,35 km² atau setara 14,21% dari total luas provinsi, sementara Kota Padang Panjang menjadi daerah paling kecil dengan luas 23,00 km² ataupun kisaran 0,05% (BPS Sumatera Barat, 2024).

Provinsi Sumatera Barat mempunyai kekayaan sumber daya alam yang melimpah, mencakup sektor pertanian, kehutanan, perikanan, pertambangan, serta pariwisata. Potensi tersebut merupakan aset strategis yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan PAD sekaligus memperkuat kemandirian fiskal daerah. Pengelolaan dan pemanfaatan SDA secara maksimal diharapkan mampu mendorong pertumbuhan perekonomian yang inklusif serta berkesinambungan pada tingkat daerah (BPS, 2024; Kementerian Dalam Negeri, 2023).

4.1.1 Tingkat Kemiskinan (Y)

Tingkat kemiskinan merupakan variabel terikat dalam temuan ini guna mengetahui seberapa besar proporsi penduduk suatu daerah yang hidup di bawah garis kemiskinan. BPS (2023) melaporkan garis kemiskinan ditentukan berdasarkan konsumsi energi minimum sebesar 2.100 kilo kalori/kapita/hari untuk kebutuhan makanan, serta pengeluaran untuk kebutuhan bukan makanan, contohnya perumahan, pendidikan, dan kesehatan.

Data tingkat kemiskinan dalam studi ini didapatkan dari BPS Provinsi Sumatera Barat yang merilis publikasi rutin tahunan. Data dikumpulkan dalam bentuk persentase penduduk miskin terhadap total jumlah penduduk di setiap kabupaten/kota. Penurunan angka kemiskinan di suatu wilayah mencerminkan keberhasilan kebijakan fiskal dan sosial pemerintah daerah.

Sebagai contoh, berdasarkan publikasi BPS (2024), meskipun Kota Padang memiliki tingkat kemiskinan terendah pada tahun 2023 (sekitar 4,12%), daerah, contohnya Kabupaten Kepulauan Mentawai, Pasaman Barat, dan Solok

Selatan masih mencatatkan angka kemiskinan di atas 9%, menunjukkan adanya kesenjangan antardaerah di dalam satu provinsi.

Tabel 4.1 : Kemiskinan Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat Tahun 2022–2024 (%)

No	Indikator	2022	2023	2024	Rata-Rata
1	Nilai Minimum	2.28	2.27	2.33	2.29
2	Nilai Maksimum	13.97	13.72	13.89	13.86

Sumber: BPS Sumatera Barat (diolah), 2025

Tabel diatas menyajikan data tingkat kemiskinan di 19 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat sepanjang 2022 hingga 2024. Secara umum, tingkat kemiskinan di daerah perkotaan lebih rendah daripada kabupaten. Kota seperti Sawahlunto, Solok, dan Padang menunjukkan angka kemiskinan yang stabil dan rendah (di bawah 5%), sedangkan Kabupaten Kepulauan Mentawai secara konsisten mencatat angka tertinggi, mencapai 13,89% pada 2024.

Data ini mencerminkan perbedaan kemampuan fiskal dan akses pelayanan dasar antar wilayah. Daerah yang memiliki infrastruktur dan sumber daya ekonomi lebih baik cenderung berhasil menurunkan kemiskinan. Hal ini sesuai dengan teori kemiskinan struktural, di mana faktor geografis, ekonomi, dan kebijakan fiskal daerah mempengaruhi kesejahteraan masyarakat.

4.1.2 Kemandirian Keuangan Daerah

Kemandirian keuangan daerah diartikan sebagai variabel independen utama dalam penelitian ini. Variabel ini mencerminkan kemampuan daerah dalam membiayai pengeluaran pemerintahannya sendiri tanpa bertumpu secara berlebihan pada dana transfer dari pemerintah pusat. Kemandirian keuangan diukur menggunakan indikator rasio PAD terhadap Total Pendapatan Daerah, sesuai dengan rumusan yang digunakan oleh Kementerian Keuangan dan berbagai studi sebelumnya (Halim, 2007; Mardiasmo, 2009).

PAD mencakup pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Semakin tinggi kontribusi PAD terhadap pendapatan total, maka semakin tinggi tingkat kemandirian suatu daerah. Daerah dengan kemandirian fiskal tinggi cenderung lebih fleksibel dan

responsif dalam menjalankan program pembangunan, terutama dalam merancang kebijakan penanggulangan kemiskinan yang sesuai dengan karakteristik lokalnya.

Kemandirian keuangan yang tinggi juga menunjukkan kemampuan daerah untuk menggali potensi ekonomi secara optimal dan efisien, serta menurunkan ketergantungan pada dana transfer seperti DAU, DAK, dan DBH (Dana Bagi Hasil). Dalam banyak kasus, daerah yang masih bergantung besar pada dana pusat menunjukkan kinerja pembangunan yang stagnan karena keterbatasan inovasi fiskal.

Tabel 4.2 Kemandirian Keuangan Daerah Sumatera Barat Tahun 2022–2024 (%)

No	Indikator	2022	2023	2024	Rata-rata
1	Nilai Minimum	6.47	5.62	7.25	6.45
2	Nilai Maksimum	40.73	42.07	39.33	40.71

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (diolah), 2025

Tabel tersebut menyajikan data tingkat kemandirian keuangan daerah pada 19 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat selama periode 2022 hingga 2024. Secara umum, kota-kota besar seperti Kota Padang, Bukittinggi, dan Payakumbuh memiliki tingkat kemandirian keuangan yang jauh lebih tinggi dibandingkan kabupaten, menunjukkan potensi fiskal yang kuat dan kapasitas pendapatan yang lebih besar. Sebaliknya, beberapa kabupaten seperti Kepulauan Mentawai, Solok Selatan, dan Padang Pariaman masih menunjukkan kemandirian fiskal yang rendah, mengindikasikan ketergantungan yang tinggi terhadap anggaran pusat. Perbedaan itu dapat dipicu oleh struktur perekonomian daerah, potensi sumber daya lokal, dan efektivitas pemerintah daerah dalam menggali PAD. Menurut Halim (2004), semakin tinggi kemandirian fiskal suatu daerah, semakin besar pula kemampuannya dalam menjalankan otonomi daerah secara efektif dan mandiri.

4.1.3 Belanja Modal

Pengeluaran pemerintah daerah yang kegunaannya lebih dari satu tahun anggaran serta akan memperbanyak asset tetap ataupun kekayaan daerah disebut belanja modal. Dalam konteks penelitian ini, belanja modal dipandang sebagai instrumen vital guna mengadakan infrastruktur public, contohnya jalan, jembatan,

irigasi, sekolah, dan rumah sakit yang secara teoritis diharapkan dapat mempermudah akses ekonomi bagi masyarakat miskin dan meningkatkan produktivitas daerah.

Tabel 4.3 Belanja Modal Sumatera Barat Tahun 2022–2024 (%)

No	Indikator	2022	2023	2024	Rata-rata
1	Nilai Minimum	3.79	3.07	4.07	3.64
2	Nilai Maksimum	5.97	5.90	5.43	5.77

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (diolah), 2025

Tabel 4.3 tersebut memperlihatkan rata-rata tingkat kemiskinan di kabupaten dan kota Provinsi Sumatera Barat sepanjang 2022–2024 menunjukkan fluktuasi yang cenderung menurun secara agregat dari 4,93% menjadi 4,78%, dengan Kota Padang mencatatkan rata-rata tertinggi sebesar 5,77% dan Kota Padang Panjang sebagai wilayah dengan rata-rata terendah yaitu 3,71%. Keberhasilan penurunan angka kemiskinan yang cukup signifikan terlihat di beberapa daerah seperti Kabupaten Pesisir Selatan dan Kota Padang, yang merefleksikan adanya efektivitas program perlindungan sosial serta pemulihan kondisi ekonomi lokal pasca-pandemi. Adanya disparitas angka kemiskinan antarwilayah ini memberikan gambaran objektif mengenai kondisi kesejahteraan masyarakat di Sumatera Barat sekaligus menjadi landasan empiris untuk menganalisis sejauh mana kontribusi variabel Kemandirian Keuangan Daerah (KKD) dalam memengaruhi akselerasi penurunan tingkat kemiskinan di masing-masing kabupaten dan kota tersebut.

Meskipun nilai belanja modal cenderung fluktuatif, rata-rata alokasi di tingkat Provinsi Sumatera Barat menunjukkan tren yang dinamis. Penurunan atau kenaikan belanja modal di setiap kabupaten/kota sangat dipengaruhi oleh kebijakan fiskal masing-masing daerah, ketersediaan ruang anggaran setelah dikurangi belanja pegawai, serta adanya prioritas pembangunan infrastruktur strategis pada tahun-tahun tertentu. Menurut Sumardjo (2010), belanja modal yang dialokasikan secara tepat sasaran merupakan prasyarat utama untuk menciptakan layanan publik yang lebih efektif, yang kemudian bisa menunjang penurunan angka kemiskinan melalui penciptaan lapangan kerja dan peningkatan aksesibilitas ekonomi masyarakat bawah.

Namun, perlu dicatat bahwa tingginya angka belanja modal tidak selalu berbanding lurus dengan penurunan kemiskinan secara instan. Efektivitas belanja modal sangat bergantung pada jenis aset yang dibangun; apakah aset tersebut bersifat pelayanan dasar yang menyentuh masyarakat miskin atau hanya bersifat administratif. Oleh karena itu, pengalokasian belanja modal yang besar di beberapa daerah di Sumatera Barat menuntut pengelolaan yang transparan dan akuntabel agar fungsi distribusinya dapat benar-benar dirasakan dalam upaya pengentasan kemiskinan.

4.1.4 Pengeluaran Pemerintah Daerah

Variabel lainnya adalah pengeluaran pemerintah daerah yang bertujuan melihat seberapa jauh intervensi fiskal pemerintah daerah melalui belanja publik berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan. Pengeluaran daerah mencakup belanja langsung (belanja pegawai, barang, serta modal) dan belanja tidak langsung (subsidi, hibah, bantuan sosial, dan transfer ke desa).

Dalam konteks pembangunan daerah, belanja pemerintah merupakan instrumen utama untuk memperkuat infrastruktur, pelayanan sosial dasar, dan menciptakan lapangan kerja. Menurut Bappenas (2020), belanja daerah yang efektif harus diarahkan pada program prioritas, contohnya pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, dan jaminan sosial, yang secara langsung menyasar kelompok miskin dan rentan.

Meskipun belanja tinggi diyakini berdampak positif terhadap penurunan kemiskinan, efektivitasnya sangat tergantung pada perencanaan, alokasi anggaran, serta pengawasan implementasinya. Dalam penelitian ini, pengeluaran pemerintah dijadikan variabel kontrol agar pengaruh kemandirian fiskal terhadap kemiskinan dapat diukur secara lebih objektif dan mengisolasi variabel lain yang mungkin berkontribusi terhadap perubahan tingkat kemiskinan.

Tabel 4.4 Pengeluaran Pemerintah Daerah Sumatera Barat tahun 2022–2024 (%)

No	Indikator	2022	2023	2024	Rata-Rata
1	Nilai Minimum	5.45	5.71	6.00	5.72
2	Nilai Maksimum	22.90	22.05	24.11	23.02

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (diolah), 2025

Berdasarkan data Tabel 4.4, rata-rata persentase PPD di kabupaten dan kota Provinsi Sumatera Barat selama periode 2022–2024 mencapai angka 10,71%, di mana Kota Padang secara konsisten mencatatkan rata-rata pengeluaran tertinggi sebesar 23,02% sementara Kota Padang Panjang berada pada angka terendah yaitu 5,98%. Perbedaan proporsi pengeluaran yang cukup kontras antarwilayah ini mencerminkan adanya disparitas kapasitas fiskal serta variasi kebutuhan belanja publik dalam penyediaan layanan dasar dan pembangunan infrastruktur di tingkat lokal. Secara keseluruhan, tren pengeluaran pemerintah yang cenderung stabil dengan sedikit peningkatan pada tahun 2024 mengindikasikan upaya penguatan stimulus ekonomi daerah melalui alokasi belanja yang diharapkan mampu berperan strategis sebagai motor penggerak dalam mengakselerasi penurunan tingkat kemiskinan di setiap kabupaten/kota di Sumatera Barat.

4.2 Hasil Uji Analisis Data

Hasil analisis data temuan ini bermaksud mengetahui korelasi antara kemampuan keuangan daerah, kemandirian keuangan, dan tingkat kemiskinan di kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat periode 2011–2024. Data yang dipergunakan bersumber dari Laporan Realisasi APBD yang dipublikasikan Kementerian Keuangan RI serta data kemiskinan dari BPS Provinsi Sumatera Barat (Kementerian Keuangan RI, 2024; BPS Sumatera Barat, 2024).

4.2.1 Uji Kesesuaian Model

Pemilihan model yang paling baik dalam analisis data panel sangat berpengaruh terhadap hasil signifikansi terbaik yang akan diperoleh, pemilihan model didasarkan dari tiga pendekatan yaitu dengan model CEM, FEM, dan

REM, satu model yang terbaik dari ketiga model itu merupakan hal yang penting dalam analisis. Maka dari itu, terlebih dahulu ditemukan model terbaik antara ketiga model di atas dengan melakukan beberapa pengujian yaitu Uji Chow, Uji Hausman, dan Uji Lagrange Multiplier dalam penelitian ini.

1. Uji Chow

Tujuannya ialah membandingkan dua model yaitu CEM dan FEM sebagai pilihan model terbaik. Pengambilan keputusan yang dilakukan yaitu melihat nilai probabilitas (p) F-Statistic. Jika nilai $p > 0,05$, maka model terbaik yang akan dipilih yaitu CEM. Namun, apabila hasil dari probabilitas $p < 0,05$ sehingga model terbaik yang akan dipilih yaitu FEM. Sebelum dilakukan uji, terlebih dahulu melakukan regresi CEM dan FEM dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 4.5 Hasil Uji Chow

Uji Chow	Signifikansi
F test (Prob > F)	0.0000

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2025

Hasil tabel uji chow di atas, nilai probabilitas dari cross section F dan Chi Square di kedua model yang lebih kecil dari Alpha 0,05 yaitu sebesar 0,0000 sehingga dapat disimpulkan bahwa menolak hipotesis nol. Uji Chow yang dihasilkan menunjukkan *Fixed Effect*, sehingga model yang dipilih yaitu FEM. Dengan didapatkannya hasil ini, sehingga diteruskan kepada Uji Hausman.

2. Uji Hausman

Tujuannya ialah memilih model paling baik antara FEM dengan REM. Hasil yang diperoleh sebagai dasar keputusan dilihat dari nilai probabilitas (p) Cross-Section. Apabila nilai yang dihasilkan oleh $p > 0,05$ sehingga model terpilih ialah REM. Namun, apabila nilai probabilitas $p < 0,005$ maka model terbaik yang dipilih yaitu FEM. Sebelum melakukan pengujian, perlu dianalisis mengenai nilai dari REM yaitu:

Tabel 4.6 Hasil Uji Hausman

Uji Hausman	Signifikansi
F test (Prob > F)	0.0000

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2025

Berdasarkan Uji Hausman yang dilakukan menyimpulkan bahwa nilai probabilitas yang didapatkan yaitu 0.0000 sehingga $p < 0.05$ sehingga model terpilih ialah FEM, maka tidak dilanjutkan untuk uji lagrange multiplier.

4.2.2 Uji Asumsi Klasik

Tujuannya ialah mengetahui adanya permasalahan asumsi klasik pada model regresi sebagai prasyarat pengujian. Pengujian ini menjamin memastikan bahwa data yang hendak dianalisis cenderung terdistribusi (pengujian normalitas), bahkan model tidak terindikasi multikolinearitas dan heteroskedastisitas. Pengujian ini dilaksanakan pada data yang diskalakan ataupun diserialkan dan hanya pada penggunaan metode Regresi Linear Berganda:

1. Uji Normalitas

Uji normalitas berfungsi untuk melakukan pengujian terhadap model regresi apakah memiliki residual yang berdistribusi normal atau tidak. Data penelitian dengan data yang baik adalah ketika data terdistribusi secara normal. Berikut adalah hasil dari uji normalitas:

Tabel 4.7 Uji Normalitas

Variabel	Obs	Pr (Skewness)	Pr (Kurtosis)	Chi 2 (2)	Prob>chi2
Kemiskinan	266	0.9195	0.0444	4.08	0.1301
Kemandirian Keuangan Daerah	266	0.4713	0.6327	0.75	0.6860
Belanja Modal	266	0.0730	0.9687	3.24	0.1981
Pengeluaran Pemerintah	266	0.2191	0.0833	4.54	0.1034

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2025

Hasil uji tersebut memperlihatkan semua variabel mempunyai tingkat probabilitas melebihi 0,05 yang menandakan data tersebut terdistribusi normal.

2. Uji Multikolinearitas

Pengujian ini berfungsi mengidentifikasi ada atau tidaknya masalah dari multikolinearitas yaitu dapat menggunakan nilai VIF, apabila jika nilai dari VIF <10.

Tabel 4.8 Uji Multikolinearitas

Variabel	VIF	1/VIF
Kemandirian Keuangan Daerah	1.16	0.864959
Belanja Modal	2.46	0.406967
Pengeluaran Pemerintah Daerah	2.66	0.375338
Mean VIF		2.09

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2025

Hasil pengujian tersebut terlihat nilai VIF dari variabel-variabel penelitian ini bernilai VIF<10 yang artinya tidak ada indikasi multikolinearitas.

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji ini berarti terdapat ketidaksamaan varian dari residual untuk pengamatan dalam model penelitian. Salah satu komponen yang harus dipenuhi yaitu model regresi tidak terdapat gejala heteroskedastisitas.

Tabel 4.9 Uji Heteroskedastisitas

Test	Prob.
Breusch Pagan	0.1422

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2025

Hasil tersebut menunjukkan probabilitas melebihi 0.05 yakni 0.1422 sehingga data dinyatakan terbebas dari heteroskedastisitas.

4.2.3 Uji Signifikansi

Hasil analisis regresi dapat dilihat dari uji signifikansi yang dilakukan terhadap model terpilih. Uji signifikansi berguna untuk melihat ada atau tidaknya kesalahan dari hasil H0 dari sampel. Beberapa pengukuran yang dipakai dalam menaksir nilai aktual dari model regresi yaitu melalui goodness of fit dari nilai koefisien determinasi R², kemudian terdapat uji signifikansi parameter secara simultan (Uji F), dan Uji signifikansi parsial (Uji t).

1. Hasil koefisien determinasi (R^2)

Koefisien determinasi atau disebut dengan R square, menjelaskan seberapa jauh kontribusi atau pengaruh yang dihasilkan terhadap variabel independen terhadap variabel terikat. Nilai koefisien determinasi yaitu nol dan 1. Jika nilai R^2 yang dihasilkan kecil, sehingga mengartikan kemampuan variabel independent dalam menerangkan variabel terikatnya cukup terbatas. Hasil perhitungan yang didapatkan dari model yang telah di uji, diperoleh nilai hasil dari koefisien determinasi R^2 adalah 0.4211 yang menandakan variabel kemandirian keuangan daerah, pengeluaran pemerintah, serta belanja modal memiliki pengaruh terhadap kemiskinan sebesar 42.11%, sementara sisanya mendapatkan pengaruh dari variabel lain yang tidak diteliti.

2. Hasil Uji F Statistik

Uji F digunakan untuk melihat signifikan atau tidaknya variabel independen yang secara bersama-sama dalam mempengaruhi variabel yang dependen. Uji F yang dilakukan dalam penelitian ini untuk melihat apakah variabel independen secara bersamaan mempengaruhi variabel dependen. Berdasarkan hasil uji data terlihat probabilitas (F-statistic) 0.00000. Nilai probabilitas itu $0.000000 < 0.05$ yang menandakan variabel kemandirian keuangan daerah, variabel pengeluaran pemerintah, dan variabel belanja modal secara bersamaan mempengaruhi kemiskinan.

3. Hasil Uji t Statistik

Tujuannya ialah melihat adanya dampak dari setiap variabel independent secara individual terhadap variabel terikatnya. Apabila nilai uji t yang dihasilkan kecil dari tingkat sig. 0.05 sehingga telah terjadi pengaruh yang signifikan dari variabel tersebut, begitupun sebaliknya. Dari hasil pengujian yang didapatkan dengan model paling baik yaitu FEM.

Kesimpulan dari variabel independen kemandirian keuangan daerah yaitu hasil uji t didapatkan nilai probabilitas kemandirian keuangan daerah terhadap kemiskinan di kabupaten/kota Provinsi Sumatera Barat 0.498 atau lebih tinggi dari tingkat alpha 0.05. Artinya variabel tersebut dinilai tidak mempengaruhi

kemiskinan di kabupaten/kota Provinsi Sumatera Barat secara signifikan. Variabel pengeluaran pemerintah dan belanja modal bernilai probabilitas $0.000 < 0.05$, sehingga pengeluaran pemerintah dan belanja modal mempengaruhi kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat secara signifikan.

4.3 Hasil Penelitian dan Pembahasan

Menurut hasil dari Uji Chow dan Uji Hausman yang sudah dilaksanakan terkait pemilihan model terbaik, dapat disimpulkan bahwa model terbaik jatuh kepada FEM. Berikut adalah hasil tabel regresi dari model:

Tabel 4.10 Hasil Uji Hipotesis FEM

Variabel	Coefficient	Std.Error	t-Statistic	Prob.
Konstanta	5.773365	0.3378554	17.09	0.000
Kemandirian Keuangan Daerah	-0.0253588	0.0373795	-0.68	0.498
Pengeluaran Pemerintah Daerah	-0.6544908	0.0679578	-9.63	0.000
Belanja Modal	0.0253588	0.0338047	3.74	0.000
R^2 0.4211				
F-Stat 0.0000				

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2025

Sehingga didapat persamaan dari hasil penelitian sebagai berikut:

$$Kemiskinan_{it} = 5.773365 - 0.0253588KKD_{it} + 0.0253588BM_{it} - 0.6544908PPD_{it}$$

Keterangan:

- a. Konstanta (5.773365). Nilai konstanta sebesar 5,77 dengan tingkat signifikansi 1% menunjukkan bahwa apabila variabel kemandirian keuangan daerah, belanja modal, dan pengeluaran pemerintah daerah dianggap konstan, sehingga tingkat kemiskinan di kabupaten/kota di Sumatera Barat berada pada angka 5,77 persen.
- b. Variabel kemandirian keuangan daerah mempunyai koefisien regresi - 0,0253588 dengan nilai probabilitas 0,498 ($> 0,05$). Hasil itu berarti KKD memiliki pengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap tingkat

kemiskinan. Jadi, peningkatan kemandirian keuangan daerah memang cenderung menurunkan angka kemiskinan, tetapi secara statistik pengaruh tersebut tidak cukup kuat. Kondisi itu membuktikan tingkat kemandirian fiskal kabupaten/kota di Sumatera Barat belum optimal dalam mendorong penurunan kemiskinan.

- c. Variabel pengeluaran pemerintah daerah menunjukkan koefisien sebesar -0,6544908 dengan nilai probabilitas 0,000 ($< 0,01$). Artinya, PPD berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan pada taraf kepercayaan 95%. Temuan ini menunjukkan bahwa semakin besar belanja pemerintah daerah, terutama yang diarahkan pada sektor produktif dan pelayanan publik, maka semakin besar pula dampaknya dalam menekan angka kemiskinan.
- d. Variabel belanja modal mempunyai koefisien -0,0253588 dengan nilai probabilitas 0,000 ($< 0,01$). Hal ini membuktikan BM mempengaruhi tingkat kemiskinan secara positif signifikan pada taraf kepercayaan 95%. Koefisien positif menunjukkan adanya anomali atau fenomena unik di mana peningkatan belanja modal justru beriringan dengan angka kemiskinan. Dengan demikian, temuan ini menunjukkan fungsi belanja modal di Sumatera Barat masih minim dan tidak langsung dirasakan untuk mengatasi kemiskinan. Terdapat beberapa argumentasi akademik yang dapat menjelaskan mengapa anomali ini terjadi:
 - Orientasi Proyek Infrastruktur Berskala Besar (Padat Modal) Pemerintah daerah di Sumatera Barat kemungkinan besar mengarahkan belanja modal pada proyek infrastruktur fisik yang sifatnya padat modal daripada padat karya. Pembangunan gedung pemerintahan, jembatan skala besar, atau monumen fisik memang meningkatkan nilai aset tetap daerah, namun tidak secara langsung menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat miskin yang memiliki kualifikasi keterampilan rendah. Hal ini menyebabkan aliran dana belanja modal hanya berputar pada kontraktor dan pekerja ahli, tanpa memberikan trickle-down effect yang signifikan bagi penduduk di bawah garis kemiskinan.

- Efek Jeda Waktu (Time Lag) Pembangunan Secara teoritis, belanja modal merupakan investasi jangka panjang. Pembangunan infrastruktur jalan atau sarana kesehatan tidak serta-merta menurunkan angka kemiskinan pada tahun yang sama saat anggaran dikeluarkan. Dibutuhkan waktu (time lag) beberapa tahun agar dampak konektivitas ekonomi dari infrastruktur tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat untuk meningkatkan pendapatan mereka. Dalam periode pengamatan penelitian ini, peningkatan belanja modal mungkin masih berada pada fase konstruksi yang belum mencapai tahap fungsional untuk menggerakkan ekonomi rakyat.
 - Ketimpangan Lokasi Pembangunan (Bias Perkotaan) Belanja modal yang dialokasikan seringkali terkonsentrasi di pusat-pusat pertumbuhan atau wilayah perkotaan guna mengejar target pertumbuhan ekonomi makro. Jika pembangunan aset tetap tidak tersebar ke wilayah pedesaan atau kantong-kantong kemiskinan, maka manfaat ekonomi dari belanja tersebut tidak akan mampu menjangkau penduduk miskin. Akibatnya, alokasi anggaran yang besar di sektor modal tidak berkorelasi dengan reduksi kemiskinan di tingkat lokal secara menyeluruh.
 - Kurangnya Sinergi dengan Sektor Pendukung Kesejahteraan Peningkatan belanja modal yang tidak diikuti peningkatan mutu SDM (belanja sosial dan pendidikan) dapat menyebabkan aset fisik yang dibangun menjadi tidak produktif. Misalnya, pembangunan pasar atau puskesmas tidak akan efektif menurunkan kemiskinan jika masyarakat tidak memiliki kemampuan ekonomi untuk berpartisipasi dalam aktivitas pasar tersebut atau tidak memiliki akses terhadap jaminan kesehatan.
- e. Koefisien Determinasi ($R^2 = 0.42110$). Nilai R^2 0.4211 mengindikasikan bahwa 42.11% variasi tingkat kemiskinan dapat dijelaskan oleh variabel kemandirian keuangan daerah, belanja modal, dan pengeluaran pemerintah daerah. Kemudian 57.89% sisanya dijelaskan variabel lainnya di luar

model, seperti pertumbuhan ekonomi, investasi, tingkat pendidikan, kesehatan, dan faktor sosial-ekonomi lainnya.

- f. Uji Simultan ($F\text{-stat} = 0,0000$). Nilai dari probabilitas $F\text{-stat}$ sebesar 0,0000 ($< 0,05$) mengindikasikan bahwa secara bersama-sama variabel KKD, BM, dan PPD mempengaruhi tingkat kemiskinan di kabupaten/kota di Sumatera Barat secara signifikan. Pernyataan itu menegaskan ketiga variabel fiskal yang diteliti secara simultan memiliki peran dalam menjelaskan variasi kemiskinan di daerah tersebut.

4.3.1 Interpretasi Hasil Analisis Data

4.3.1.1 Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah (KKD) terhadap Kemiskinan

Menurut hasil pengujian regresi linear data panel dengan model regresi FEM, hasil estimasi menunjukkan bahwa Kemandirian Keuangan Daerah (KKD) mempunyai koefisien regresi negatif -0,0253588 dengan nilai probabilitas 0,498 ($> 0,05$). Hasil itu membuktikan peningkatan kemandirian keuangan daerah cenderung menurunkan tingkat kemiskinan, namun pengaruh tersebut tidak signifikan secara statistik pada kabupaten/kota di Sumatera Barat.

Kondisi ini mengindikasikan peran PAD belum mampu memberikan dampak yang kuat dalam intervensi penurunan angka kemiskinan. Ketergantungan daerah yang masih cukup tinggi terhadap dana transfer pusat menyebabkan fleksibilitas fiskal daerah dalam mendanai program-program pengentasan kemiskinan yang berbasis potensi lokal belum maksimal.

4.3.1.2 Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Daerah (PPD) terhadap Kemiskinan

Variabel PPD memiliki koefisien regresi -0,6544908 dengan nilai probabilitas 0,000 ($< 0,01$). Artinya, pengeluaran pemerintah daerah mempengaruhi tingkat kemiskinan secara negatif signifikan. Studi ini membuktikan bahwa setiap peningkatan belanja pemerintah daerah berpotensi menekan angka kemiskinan.

Hal ini dapat dijelaskan bahwa belanja publik, khususnya pada sektor-sektor krusial seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program perlindungan sosial, mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin serta memperluas kesempatan ekonomi, sehingga berdampak pada penurunan tingkat kemiskinan di daerah.

4.3.1.3 Pengaruh Belanja Modal (BM) terhadap Kemiskinan

Variabel BM memiliki koefisien regresi 0.0253588 dengan nilai dengan nilai probabilitas 0,000 ($< 0,01$). Artinya, BM mempengaruhi kemiskinan secara positif signifikan. Temuan ini menunjukkan peningkatan belanja modal justru diikuti oleh peningkatan angka kemiskinan di kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat.

Kondisi tersebut dapat dijelaskan bahwa alokasi belanja modal di Provinsi Sumatera Barat yang masih minim hal ini diakibatkan karena sebagian besar APBD masih terserap untuk belanja operasional (pegawai). Kedua, belanja modal yang ada kemungkinan lebih banyak difokuskan pada pembangunan aset fisik administratif atau sarana prasarana yang tidak bersentuhan langsung dengan aktivitas ekonomi masyarakat miskin. Ketiga, adanya jeda waktu (*time lag*) antara pembangunan infrastruktur dengan dampak ekonomi yang dihasilkan, sehingga dalam jangka pendek pengaruhnya belum terlihat dalam mengurangi kemiskinan

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Tujuan penelitian ini yaitu menganalisis pengaruh kemandirian keuangan daerah, pengeluaran pemerintah daerah, dan belanja modal terhadap tingkat kemiskinan di kabupaten/kota Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan hasil analisis data panel menggunakan model regresi, diperoleh beberapa kesimpulan penting yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Kemandirian Keuangan Daerah (KKD) memiliki pengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Artinya, meskipun peningkatan KKD memiliki kecenderungan menurunkan angka kemiskinan, namun pengaruh itu tidak terbukti kuat secara statistik. Kondisi tersebut membuktikan sumber penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum mampu menjadi instrumen yang efektif dalam pengentasan kemiskinan. Hal ini dapat disebabkan oleh keterbatasan kapasitas fiskal daerah, rendahnya basis pajak dan retribusi, serta belum optimalnya pengelolaan potensi ekonomi lokal. Dengan demikian, peran kemandirian keuangan daerah masih relatif kecil dalam mendukung kebijakan pengurangan kemiskinan di Sumatera Barat.
2. Pengeluaran Pemerintah Daerah (PPD) mempengaruhi tingkat kemiskinan secara positif signifikan. Hasil tersebut membuktikan bahwa setiap peningkatan belanja daerah, khususnya pada sektor yang produktif, berkontribusi nyata dalam menekan angka kemiskinan. Pemerintah daerah yang mampu mengalokasikan anggaran secara tepat, misalnya pada pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat, dapat menciptakan dampak yang langsung dirasakan oleh kelompok miskin. Dengan kata lain, belanja daerah memiliki fungsi strategis dalam mendorong pemerataan kesejahteraan dan mempercepat proses pengentasan kemiskinan.
3. Belanja Modal (BM) berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Hal ini menunjukkan fungsi belanja modal di Sumatera Barat

masih minim dan tidak langsung dirasakan untuk mengentaskan kemiskinan. Anggaran belanja modal di Provinsi Sumatera Barat yang masih minim diakibatkan besarnya alokasi belanja pemerintah untuk hal lain seperti untuk kepegawaian, pendidikan, dan kesehatan. Belanja modal mencerminkan sedikit banyaknya infrastruktur dan sarana yang dibangun. PAD adalah sumber penghasilan daerah yang bersumber dari potensi daerah masing-masing yang memerlukan peningkatan untuk pembiayaan pengeluaran daerah, terkhusus belanja modal. Adanya peningkatan PAD setiap Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat membuat pengalokasian dana belanja modal juga meningkat.

4. Hasil pengujian koefisien determinasi R^2 yaitu 0.4211 menandakan sekitar 42.11% variasi tingkat kemiskinan di kabupaten/kota Sumatera Barat dapat dijelaskan oleh ketiga variabel penelitian, yaitu kemandirian keuangan daerah (KKD), pengeluaran pemerintah daerah (PPD), serta belanja modal (BM). Kemudian 57.89% sisanya mendapatkan pengaruh dari faktor lainnya yang tidak dimasukkan ke dalam model, seperti tingkat pendidikan, tingkat pengangguran, inflasi, investasi, serta faktor sosial-ekonomi lainnya. Hal ini menegaskan bahwa permasalahan kemiskinan merupakan fenomena multidimensional yang dipengaruhi oleh banyak variabel selain faktor fiskal.

Secara umum, penelitian ini membuktikan bahwa instrumen fiskal daerah di Sumatera Barat mempunyai peran berbeda dan kompleks dalam menanggulangi kemiskinan. Poin utama yang dibuktikan adalah bahwa Pengeluaran Pemerintah Daerah (PPD) merupakan faktor kunci yang paling efektif dalam menurunkan angka kemiskinan secara signifikan. Sebaliknya, Kemandirian Keuangan Daerah (KKD) belum cukup kuat untuk memberikan dampak nyata karena keterbatasan kapasitas fiskal, sementara Belanja Modal (BM) justru menunjukkan pengaruh positif yang membuktikan bahwa alokasi anggaran fisik di Sumatera Barat saat ini belum tepat sasaran atau masih terlalu minim untuk menyentuh kebutuhan langsung penduduk miskin. Penelitian ini menegaskan bahwa kebijakan fiskal saja hanya mampu menjelaskan 42,11% dinamika kemiskinan, sehingga pembuktian

ini memperkuat teori bahwa kemiskinan adalah fenomena multidimensional yang juga sangat bergantung pada faktor non-fiskal lainnya.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian, peneliti mengajukan sejumlah saran yang ditujukan kepada banyak pihak terkait, baik pemerintah daerah, pemerintah pusat, maupun akademisi/peneliti selanjutnya, sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat

- **Reorientasi dan Evaluasi Belanja Modal:** Mengingat hasil temuan membuktikan belanja modal mempunyai pengaruh positif terhadap kemiskinan, pemerintah daerah perlu mengevaluasi efektivitas alokasi belanja modal. Disarankan agar belanja modal bukan sekadar fokus kepada pembangunan fisik administratif (misalnya gedung kantor), namun lebih diarahkan pada pembangunan infrastruktur yang memiliki multiplier effect bagi masyarakat miskin, seperti jalan usaha tani, jaringan irigasi, dan sarana pasar tradisional.
- **Mempertahankan Kualitas Pengeluaran Pemerintah (PPD):** Karena PPD terbukti signifikan menurunkan kemiskinan, pemerintah daerah harus tetap memprioritaskan belanja pada sektor pelayanan dasar (pendidikan dan kesehatan) serta program perlindungan sosial. Penyaluran anggaran ini harus dipastikan tepat sasaran agar efektifitasnya dalam menekan angka kemiskinan tetap terjaga.
- **Penguatan Basis Pendapatan Asli Daerah (PAD):** Pemerintah daerah perlu lebih inovatif dalam menggali potensi PAD melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak serta retribusi daerah tanpa membebani sektor UMKM. Hal ini penting agar kemandirian keuangan daerah meningkat, sehingga daerah memiliki kapasitas fiskal yang lebih besar untuk mendanai program penanggulangan kemiskinan secara mandiri.

2. Bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

- Sinkronisasi Kebijakan Fiskal: Pemerintah Provinsi disarankan untuk meningkatkan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota dalam hal sinkronisasi program pembangunan. Hal ini bertujuan agar pembangunan infrastruktur (Belanja Modal) yang dilakukan di daerah selaras dengan upaya pengentasan kemiskinan di tingkat provinsi, sehingga alokasi anggaran tidak terkesan minim dampak
- Pemberian Stimulus dan Insentif Berbasis Kinerja: Pemerintah Provinsi dapat merumuskan kebijakan bantuan keuangan atau insentif bagi Kabupaten/Kota yang berhasil meningkatkan kemandirian fiskalnya sekaligus menurunkan angka kemiskinan secara signifikan. Hal ini penting untuk mendorong persaingan positif antar daerah dalam mengelola PAD agar lebih berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, bukan sekadar mengejar target penerimaan daerah semata.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

- Penambahan Variabel Multidimensional: Karena nilai koefisien determinasi menunjukkan masih adanya faktor lain di luar model, peneliti selanjutnya disarankan menambah variabel non-fiskal seperti Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), atau tingkat inflasi daerah untuk memperoleh gambaran yang lebih luas.
- Metode Penelitian Kualitatif: Peneliti selanjutnya dapat melengkapi penelitian ini dengan metode kualitatif atau studi kasus pada kabupaten/kota tertentu yang memiliki anomali tinggi (misal: PAD tinggi namun kemiskinan juga tinggi) untuk mengetahui kendala teknis di lapangan.

5.3 Implikasi Kebijakan

Dari hasil analisis data serta kesimpulan yang sudah diuraikan, temuan ini menghasilkan berbagai implikasi kebijakan yang diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi Pemerintah Daerah di Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut:

1. Memperbaiki Arah Pembangunan Fisik (Belanja Modal). Hasil studi membuktikan bahwa pembangunan fisik atau belanja modal saat ini belum efektif dalam menurunkan angka kemiskinan. Hal ini memberikan pelajaran bagi pemerintah bahwa pembangunan tidak boleh hanya fokus pada pembangunan gedung kantor atau proyek besar di perkotaan saja. Kebijakan ke depan harus lebih diarahkan pada pembangunan infrastruktur yang menyentuh langsung kehidupan rakyat kecil, seperti perbaikan jalan-jalan di desa, irigasi sawah, dan fasilitas pasar agar ekonomi warga miskin bisa bergerak.
2. Mempertahankan Belanja pada Sektor Pelayanan Publik. Pengeluaran pemerintah terbukti mampu menurunkan kemiskinan, maka kebijakan untuk mengalokasikan anggaran pada sektor pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial harus terus dipertahankan. Pemerintah perlu menjamin bahwa setiap dana yang dikeluarkan benar-benar sampai ke tangan yang tepat dan tepat sasaran, sehingga beban pengeluaran warga miskin dapat berkurang.
3. Mencari Cara Baru Meningkatkan PAD. Saat ini, kemandirian keuangan daerah belum memberikan dampak besar bagi pengurangan kemiskinan. Hal ini memberikan gambaran bahwa pemerintah daerah perlu lebih kreatif dalam mencari sumber pendapatan daerah tanpa harus memberatkan masyarakat kecil atau pelaku UMKM. Jika pendapatan daerah meningkat secara mandiri, pemerintah akan memiliki lebih banyak modal untuk membiayai program-program kesejahteraan tanpa harus selalu bergantung pada bantuan dana dari pemerintah pusat.
4. Kerjasama Lintas Dinas dan Sektor. Penelitian ini membuktikan bahwa masalah kemiskinan tidak bisa diselesaikan hanya dari sisi keuangan saja, karena masih banyak faktor lain yang mempengaruhi (seperti pendidikan

dan lapangan kerja). Oleh karena itu, diperlukan kerjasama yang lebih erat antar dinas (seperti Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, dan Dinas Pekerjaan Umum) agar program penanggulangan kemiskinan dapat dilakukan secara bersamaan dan bukan berjalan sendiri.

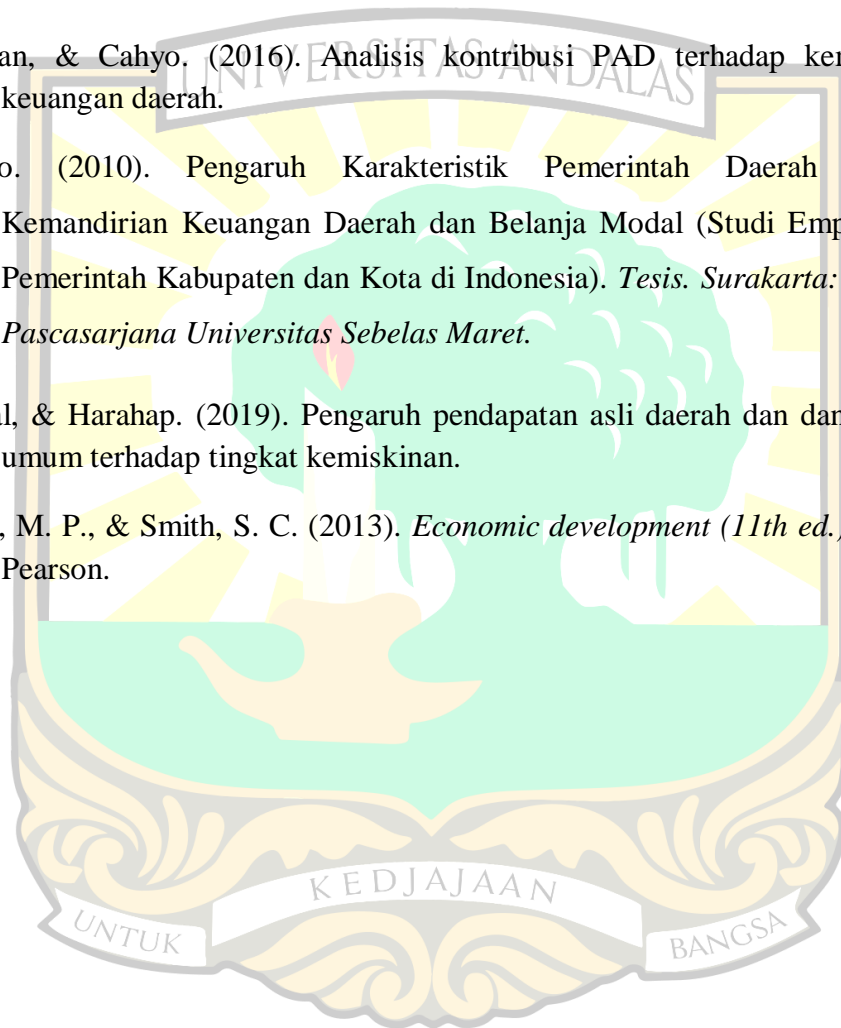


DAFTAR PUSTAKA

- Afiat, M. N. (2019). Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Perubahan Struktur Ekonomi Di Provinsi Sulawesi Tenggara. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*.
- Arnaldi, & Yusra, I. (2019). Analisis Kinerja APBD Provinsi di Indonesia: Sebuah Studi Mengenai Rasio Keuangan, Korelasi Metri, dan Klasterisasi Kinerja. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 10(3).
- Arnaldi, & Yusra, I. (2020). Analisis Keuangan Pemerintah Daerah Kota Padang Tahun 2014-2018 Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Daerah. *Jurnal Pundi*, 4(1), 83-100.
- Asmara, A., & Cahaya, S. S. (2014). Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Banten. *Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah*, 6(1), 41-53.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). (2022). *Laporan Analisis Ketergantungan Fiskal Daerah*.
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Metodologi perhitungan kemiskinan di Indonesia*. Jakarta.
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Persentase penduduk miskin menurut provinsi, 2019-2024*. Jakarta.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat. (2024). *Provinsi Sumatera Barat dalam angka 2024*. Padang: BPS Sumbar.
- Bappeda Sumatera Barat. (2023). *Laporan perencanaan pembangunan daerah Sumatera Barat*. Padang: Bappeda.
- BPK Perwakilan Sumatera Barat. (2023). *Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah*. Padang: BPK RI.
- Darwanto. (2015). Analisis pengaruh belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2011). *Deskripsi dan analisis APBD 2011*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Gujarati, D. N. (2004). *Basic econometric (4th ed.)*. New York: McGraw-Hill.

- Gunawan, & Haryanto. (2018). Analisis Kemandirian keuangan daerah dan pengaruhnya terhadap kemiskinan.
- Halim, A. (2004). Akuntansi keuangan daerah.
- Halim, A. (2007). Akuntansi sektor publik: Akuntansi keuangan daerah.
- Halim, A. (2014). Manajemen keuangan sektor publik: Problematika penerimaan dan pengeluaran pemerintah.
- Kaloh,J,Dr. (2002). *Mencari Bentuk Otonomi Daerah suatu solusi dalam menjawab kebutuhan lokal dan tantangan global*. Jakarta : PT.RINEKA CIPTA
- Kuncoro , M. (2000). *Ekonomi Pembangunan: Teori, masalah, dan kebijakan*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Kuncoro, M. (2004). *Otonomi dan pembangunan daerah: Reformasi, perencanaan, strategi, dan peluang*. Jakarta: Erlangga.
- Kuncoro, M. (2010). *Masalah, kebijakan, dan politik: Ekonomi Pembangunan*. Jakarta: Erlangga.
- Ma'ruf, A., & Widiastuti, L. (2008). Pertumbuhan Ekonomi Indonesia: Determinan dan Prospeknya. *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan*, 9(1), 44-55
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Musgrave, R. A. (1959). *The theory of public finance: A study in public economy*. New York: McGraw-Hill.
- Nalle, Frederick Winston dan Pangastuti, Margaretha Diana. (2023). Determinants of regional financial performance and poverty level in North Central Timor Regency. *Fair Value: Jurnal Ekonomi dan Keuangan*.
- Nasikun. (2001). *Isu dan kebijakan penanggulangan kemiskinan*. Yogyakarta: Aditya Media.
- Prihatiningsih. (2010). Analisis Kemandirian Fiskal Daerah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 1(2), 121–136.

- Purnomo, Sodik Dwi dan Danuta, Krisnhoe. (2022). Analisis Kemampuan Keuangan Daerah terhadap Kemiskinan: Studi Empiris di Sumatera Utara. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*.
- Republik Indonesia. (n.d.). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.
- Republik Indonesia. (n.d.). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*.
- Sebastian, & Cahyo. (2016). Analisis kontribusi PAD terhadap kemandirian keuangan daerah.
- Sumarjo. (2010). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah dan Belanja Modal (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Indonesia). *Tesis. Surakarta: Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret*.
- Syahrial, & Harahap. (2019). Pengaruh pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap tingkat kemiskinan.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2013). *Economic development (11th ed.)*. Boston: Pearson.



LAMPIRAN

Lampiran I Data Variabel

Kab/Kota	Tahun	Kemiskinan	Kemandirian Keuangan Daerah	Pengeluaran Pemerintah Daerah	Belanja modal
Kab. Kepulauan Mentawai	2011	18.85	9.88	6.70	4.80
Kab. Kepulauan Mentawai	2012	16.7	8.12	8.20	5.04
Kab. Kepulauan Mentawai	2013	16.12	5,52	9,68	5.50
Kab. Kepulauan Mentawai	2014	14.96	5,60	9,21	5.29
Kab. Kepulauan Mentawai	2015	15.52	6,26	9,42	5.53
Kab. Kepulauan Mentawai	2016	15.12	5,11	11,79	5.63
Kab. Kepulauan Mentawai	2017	14.67	8,27	11,18	5.75
Kab. Kepulauan Mentawai	2018	14.44	5,51	9,00	5.40
Kab. Kepulauan Mentawai	2019	14.43	4,36	9,93	5.70
Kab. Kepulauan Mentawai	2020	14.35	4,68	8,51	4.96
Kab. Kepulauan Mentawai	2021	14.84	4,25	8,70	5.10
Kab. Kepulauan Mentawai	2022	13.97	6,68	8,27	4.70
Kab. Kepulauan Mentawai	2023	13.72	5,61	9,76	5.37
Kab. Kepulauan Mentawai	2024	13.89	7,39	9,71	4.96

Kab. Pesisir Selatan	2011	9.75	4,88	8,57	4.87
Kab. Pesisir Selatan	2012	8.68	4,50	9,20	4.86
Kab. Pesisir Selatan	2013	8.64	5,92	10,58	5.12
Kab. Pesisir Selatan	2014	7.82	9,79	12,61	5.36
Kab. Pesisir Selatan	2015	8.46	11,59	15,30	5.62
Kab. Pesisir Selatan	2016	7.92	8,67	16,57	5.65
Kab. Pesisir Selatan	2017	7.79	14,00	15,91	5.55
Kab. Pesisir Selatan	2018	7.59	9,71	16,34	5.55
Kab. Pesisir Selatan	2019	7.88	9,56	17,05	5.78
Kab. Pesisir Selatan	2020	7.61	10,07	16,20	5.57
Kab. Pesisir Selatan	2021	7.92	10,98	16,08	5.39
Kab. Pesisir Selatan	2022	7.11	10,76	17,33	5.57
Kab. Pesisir Selatan	2023	7.34	10,28	15,57	5.41
Kab. Pesisir Selatan	2024	7.49	12,65	17,83	5.15
Kab. Solok	2011	11.19	5,51	6,95	4.47
Kab. Solok	2012	10.03	4,40	8,16	4.91
Kab. Solok	2013	10.26	4,62	8,82	4.97
Kab. Solok	2014	9.53	6,74	10,26	5.17
Kab. Solok	2015	10	6,92	10,64	5.19
Kab. Solok	2016	9.32	5,77	13,23	5.32
Kab. Solok	2017	9.06	11,60	12,48	5.32
Kab. Solok	2018	8.88	6,83	12,06	5.12
Kab. Solok	2019	7.98	7,00	12,82	5.27
Kab. Solok	2020	7.81	7,33	11,75	4.71
Kab. Solok	2021	8.01	7,38	12,06	4.91
Kab. Solok	2022	7.12	6,47	13,29	5.23
Kab. Solok	2023	7.13	8,37	12,31	5.19
Kab. Solok	2024	7.31	7,24	13,45	5.18
Kab. Sijunjung	2011	9.94	5,80	4,65	4.12
Kab. Sijunjung	2012	8.79	7,12	6,18	4.63
Kab. Sijunjung	2013	8.53	7,05	7,22	5.07
Kab. Sijunjung	2014	7.74	9,03	7,96	4.97
Kab. Sijunjung	2015	7.87	10,51	9,18	5.12
Kab. Sijunjung	2016	7.6	10,02	10,35	5.50

Kab. Sijunjung	2017	735	13,32	9,48	5.25
Kab. Sijunjung	2018	7.11	10,06	10,80	5.33
Kab. Sijunjung	2019	7.04	4,75	10,95	5.32
Kab. Sijunjung	2020	6.78	11,42	10,21	4.97
Kab. Sijunjung	2021	6.8	11,65	10,09	4.89
Kab. Sijunjung	2022	6	12,13	11,07	5.13
Kab. Sijunjung	2023	5.88	12,79	11,32	5.20
Kab. Sijunjung	2024	5.78	12,56	11,28	4.87
Kab. Tanah Datar	2011	6.57	10,32	7,37	4.35
Kab. Tanah Datar	2012	5.95	9,10	8,13	4.46
Kab. Tanah Datar	2013	5.77	9,70	9,53	4.85
Kab. Tanah Datar	2014	5.29	13,68	10,88	4.81
Kab. Tanah Datar	2015	5.82	14,61	12,42	4.92
Kab. Tanah Datar	2016	5.68	11,69	13,90	5.24
Kab. Tanah Datar	2017	5.56	17,29	13,00	5.29
Kab. Tanah Datar	2018	5.32	11,28	13,24	5.11
Kab. Tanah Datar	2019	4.66	11,86	14,29	5.31
Kab. Tanah Datar	2020	4.4	12,43	12,46	4.68
Kab. Tanah Datar	2021	4.54	114,18	12,75	4.96
Kab. Tanah Datar	2022	4.26	15,12	12,88	4.72
Kab. Tanah Datar	2023	4.16	14,42	12,51	4.88
Kab. Tanah Datar	2024	4,28	15,69	14,53	4.97
Kab. Padang Pariaman	2011	11.26	4,89	7,90	4.77
Kab. Padang Pariaman	2012	10.12	4,82	8,86	4.89
Kab. Padang Pariaman	2013	9.17	5,67	9,60	5.03
Kab. Padang Pariaman	2014	8.39	11,94	8,80	5.06
Kab. Padang Pariaman	2015	8.86	8,42	12,59	5.35
Kab. Padang Pariaman	2016	8.91	6,42	13,85	5.73

Kab. Padang Pariaman	2017	8.46	12,72	14,67	5.91
Kab. Padang Pariaman	2018	8.04	7,65	13,44	5.57
Kab. Padang Pariaman	2019	7.1	8,07	14,50	5.57
Kab. Padang Pariaman	2020	6.95	9,77	13,98	5.21
Kab. Padang Pariaman	2021	7.22	10,47	13,36	4.92
Kab. Padang Pariaman	2022	6.25	11,31	13,59	4.91
Kab. Padang Pariaman	2023	6.34	12,41	13,95	5.21
Kab. Padang Pariaman	2024	6.27	10,00	13,87	5.04
Kab. Agam	2011	9.39	6,73	8,34	4.45
Kab. Agam	2012	8.43	5,96	8,85	4.47
Kab. Agam	2013	7.68	6,52	11,06	5.09
Kab. Agam	2014	7.02	9,54	11,81	5.03
Kab. Agam	2015	7.58	10,14	13,64	5.08
Kab. Agam	2016	7.83	8,78	14,47	5.26
Kab. Agam	2017	7.59	13,97	14,75	5.60
Kab. Agam	2018	6.76	8,43	14,46	5.36
Kab. Agam	2019	6.75	9,75	15,69	5.64
Kab. Agam	2020	6.75	9,40	14,20	4.91
Kab. Agam	2021	6.85	11,36	14,46	4.96
Kab. Agam	2022	6.22	13,59	15,55	5.10
Kab. Agam	2023	6.6	11,98	13,81	5.04
Kab. Agam	2024	6.83	12,85	15,82	4.93
Kab. Lima Puluh Kota	2011	9.96	4,44	7,72	4.64
Kab. Lima Puluh Kota	2012	8.89	3,99	8,28	4.72
Kab. Lima Puluh Kota	2013	8.26	4,66	9,39	5.10
Kab. Lima Puluh Kota	2014	7.48	6,76	10,53	5.25
Kab. Lima Puluh Kota	2015	7.65	7,63	11,72	5.33
Kab. Lima Puluh Kota	2016	7.59	6,40	13,68	5.53
Kab. Lima Puluh Kota	2017	7.15	10,78	13,13	5.45
Kab. Lima Puluh Kota	2018	6.99	6,46	13,21	5.45
Kab. Lima Puluh Kota	2019	6.97	7,15	14,27	5.53

Kab. Lima Puluh Kota	2020	6.86	7,54	12,53	5.03
Kab. Lima Puluh Kota	2021	7.29	7,20	12,93	4.99
Kab. Lima Puluh Kota	2022	6.59	7,86	12,50	5.01
Kab. Lima Puluh Kota	2023	6.8	9,37	11,58	5.06
Kab. Lima Puluh Kota	2024	6.92	9,08	14,02	5.11
Kab. Pasaman	2011	10.42	6,05	6,10	4.56
Kab. Pasaman	2012	9.31	6,65	6,77	4.69
Kab. Pasaman	2013	8.37	8,45	8,08	5.00
Kab. Pasaman	2014	7.6	11,94	8,80	5.06
Kab. Pasaman	2015	8.14	12,25	9,80	5.17
Kab. Pasaman	2016	7.65	10,62	11,44	5.46
Kab. Pasaman	2017	7.41	17,61	10,77	5.22
Kab. Pasaman	2018	7.31	12,46	10,54	4.95
Kab. Pasaman	2019	7.21	11,69	10,84	4.84
Kab. Pasaman	2020	7.16	11,06	10,69	4.83
Kab. Pasaman	2021	7.48	10,47	11,25	4.67
Kab. Pasaman	2022	6.85	10,78	11,55	5.02
Kab. Pasaman	2023	6.8	10,70	10,69	5.10
Kab. Pasaman	2024	6.74	12,24	10,68	4.63
Kab. Solok Selatan	2011	10.61	4,44	4,28	4.87
Kab. Solok Selatan	2012	9.37	5,69	5,51	5.01
Kab. Solok Selatan	2013	8.12	5,21	5,66	5.11
Kab. Solok Selatan	2014	7.33	6,37	6,16	5.28
Kab. Solok Selatan	2015	7.52	7,23	7,60	5.37
Kab. Solok Selatan	2016	7.35	7,50	9,00	5.46
Kab. Solok Selatan	2017	7.21	11,14	8,62	5.41
Kab. Solok Selatan	2018	7.07	9,01	8,04	5.27
Kab. Solok Selatan	2019	7.33	8,75	8,88	5.04
Kab. Solok Selatan	2020	7.15	10,66	9,20	4.82
Kab. Solok Selatan	2021	7.52	11,67	8,95	4.64
Kab. Solok Selatan	2022	6.51	12,90	10,09	5.31

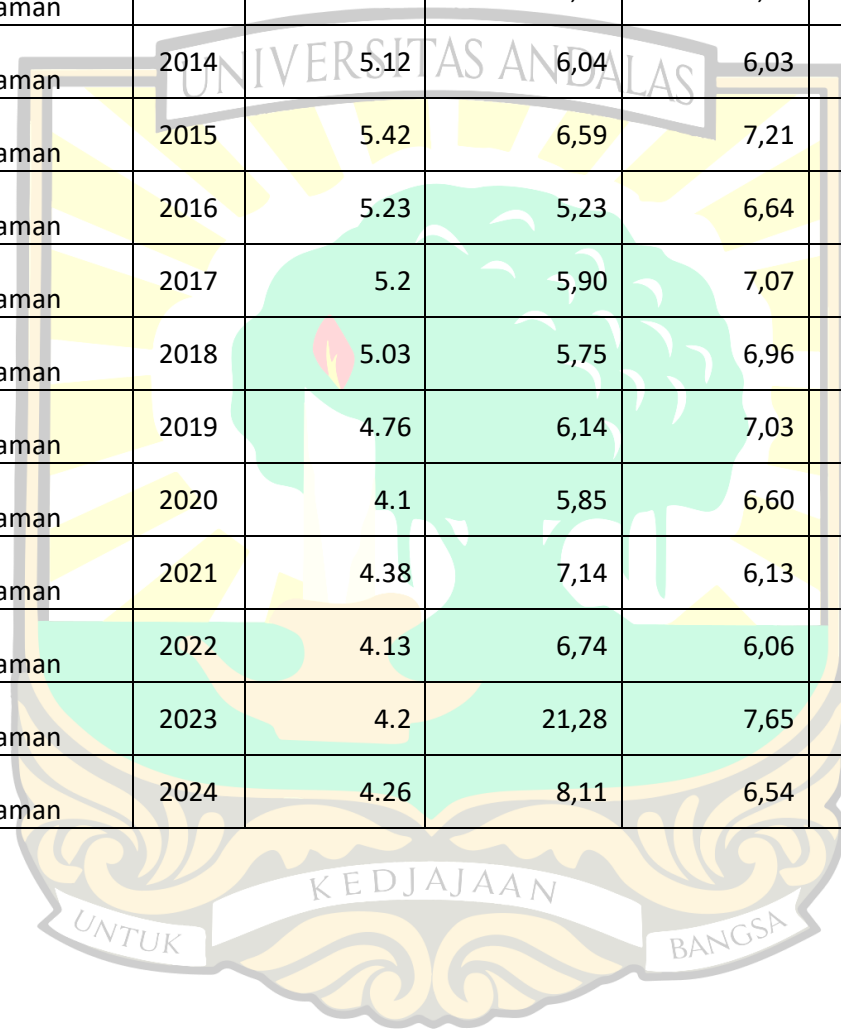
Kab. Solok Selatan	2023	6.45	12,60	9,04	4.82
Kab. Solok Selatan	2024	6.56	11,49	8,70	4.85
Kab. Dharmasraya	2011	10.09	9,50	5,00	4.81
Kab. Dharmasraya	2012	8.82	9,37	6,31	4.98
Kab. Dharmasraya	2013	7.74	6,81	6,28	5.10
Kab. Dharmasraya	2014	6.97	9,71	7,09	5.21
Kab. Dharmasraya	2015	7.17	9,37	8,34	5.39
Kab. Dharmasraya	2016	7.16	7,27	9,08	5.58
Kab. Dharmasraya	2017	6.68	12,46	9,53	5.44
Kab. Dharmasraya	2018	6.42	14,14	9,69	5.38
Kab. Dharmasraya	2019	6,29	9,29	10,57	5.42
Kab. Dharmasraya	2020	6,23	9,96	9,89	5.27
Kab. Dharmasraya	2021	6.67	10,51	9,25	5.08
Kab. Dharmasraya	2022	5.56	13,85	10,09	4.89
Kab. Dharmasraya	2023	5.56	13,57	9,19	4.91
Kab. Dharmasraya	2024	5.32	12,97	9,71	5.04
Kab. Pasaman Barat	2011	9.14	5,64	6,08	4.92
Kab. Pasaman Barat	2012	8.04	6,00	7,45	5.02
Kab. Pasaman Barat	2013	7.86	6,10	7,71	5.03
Kab. Pasaman Barat	2014	7.08	10,23	9,23	5.26
Kab. Pasaman Barat	2015	7.93	9,39	10,45	5.37
Kab. Pasaman Barat	2016	7.4	9,81	11,92	5.59
Kab. Pasaman Barat	2017	7.26	18,47	12,54	5.57
Kab. Pasaman Barat	2018	7.34	17,40	12,59	5.79
Kab. Pasaman Barat	2019	7.14	10,51	12,47	5.57

Barat					
Kab. Pasaman Barat	2020	7.04	12,37	11,83	5.21
Kab. Pasaman Barat	2021	7.51	15,40	11,28	4.98
Kab. Pasaman Barat	2022	6.93	12,43	12,58	5.13
Kab. Pasaman Barat	2023	6.92	14,22	11,95	5.22
Kab. Pasaman Barat	2024	7	11,70	14,15	5.17
Kota Padang	2011	6.02	18,09	12,32	4.95
Kota Padang	2012	5.3	18,13	15,06	5.39
Kota Padang	2013	5.02	20,90	18,14	5.67
Kota Padang	2014	4.56	26,70	20,41	5.61
Kota Padang	2015	4.93	31,68	22,94	5.66
Kota Padang	2016	4.68	27,19	24,93	6.01
Kota Padang	2017	4.74	38,82	22,13	5.99
Kota Padang	2018	4.7	33,50	23,04	6.04
Kota Padang	2019	4.48	34,64	24,07	6.20
Kota Padang	2020	4.4	34,27	21,57	5.72
Kota Padang	2021	4.94	37,20	22,27	5.70
Kota Padang	2022	4.26	40,72	22,90	5.97
Kota Padang	2023	4.17	42,06	22,05	5.90
Kota Padang	2024	4.06	39,32	24,11	5.43
Kota Solok	2011	6.72	8,86	4,64	4,13
Kota Solok	2012	5.87	7,17	5,00	4.65
Kota Solok	2013	4.6	6,67	5,13	4.49
Kota Solok	2014	4.16	7,37	5,45	4.43
Kota Solok	2015	4.12	8,81	5,81	4.57
Kota Solok	2016	3.86	8,28	6,55	4.91
Kota Solok	2017	3.66	8,04	6,66	4.95
Kota Solok	2018	3.3	8,29	7,88	5.07
Kota Solok	2019	3.24	7,85	6,66	4.75
Kota Solok	2020	2.77	8,61	5,67	3.49
Kota Solok	2021	3.12	9,13	6,63	4.49
Kota Solok	2022	3.02	8,56	6,96	4.60
Kota Solok	2023	3.05	8,69	7,01	4.93
Kota Solok	2024	3.07	9,75	6,16	4.35
Kota Sawahlunto	2011	2.34	13,28	3,94	4.26
Kota Sawahlunto	2012	2.17	10,98	4,66	4.20
Kota Sawahlunto	2013	2.28	8,32	4,76	4.23
Kota Sawahlunto	2014	2.25	12,60	5,48	4.48
Kota	2015	2.22	12,75	6,37	4.91

Sawahlunto					
Kota Sawahlunto	2016	2.21	10,86	6,31	4.89
Kota Sawahlunto	2017	2.01	13,15	5,94	4.82
Kota Sawahlunto	2018	2.39	9,27	5,83	4.35
Kota Sawahlunto	2019	2.17	10,47	6,24	4.55
Kota Sawahlunto	2020	2.16	12,55	5,55	4.15
Kota Sawahlunto	2021	2.38	10,10	6,39	4.45
Kota Sawahlunto	2022	2.28	12,94	6,78	4.76
Kota Sawahlunto	2023	2.27	11,46	5,71	4.42
Kota Sawahlunto	2024	2.33	11,31	6,00	4.29
Kota Padang Panjang	2011	7.25	11,25	3,99	4.20
Kota Padang Panjang	2012	6.5	10,49	4,11	3.85
Kota Padang Panjang	2013	6.66	12,34	4,70	4.22
Kota Padang Panjang	2014	6.4	13,62	4,88	4.17
Kota Padang Panjang	2015	6.74	17,58	6,57	4.71
Kota Padang Panjang	2016	6.75	15,23	6,93	4.99
Kota Padang Panjang	2017	6.17	18,41	7,53	5.35
Kota Padang Panjang	2018	5.88	18,49	8,10	4.83
Kota Padang Panjang	2019	5.6	16,43	6,00	4.59
Kota Padang Panjang	2020	5.24	18,02	5,91	4.00
Kota Padang Panjang	2021	5.92	21,28	5,55	4.06
Kota Padang Panjang	2022	5.14	20,31	5,45	3.79
Kota Padang Panjang	2023	5.24	20,98	5,76	4.07
Kota Padang Panjang	2024	5.31	20,56	6,74	4.28
Kota Bukittinggi	2011	6.49	13,79	4,73	3.92

Kota Bukittinggi	2012	5.73	12,31	5,09	3.93
Kota Bukittinggi	2013	5.36	13,50	5,93	4.33
Kota Bukittinggi	2014	4.96	13,60	6,46	4.34
Kota Bukittinggi	2015	5.36	14,67	7,02	4.24
Kota Bukittinggi	2016	5.48	12,89	6,96	4.39
Kota Bukittinggi	2017	5.35	19,54	6,13	4.75
Kota Bukittinggi	2018	4.92	18,49	8,10	5.18
Kota Bukittinggi	2019	4.6	19,35	7,17	5.24
Kota Bukittinggi	2020	4.54	15,02	10,03	5.52
Kota Bukittinggi	2021	5.14	16,35	6,50	4.53
Kota Bukittinggi	2022	4.46	24,56	8,67	4.82
Kota Bukittinggi	2023	4.11	21,28	7,65	4.27
Kota Bukittinggi	2024	4.08	21,01	8,34	4.15
Kota Payakumbuh	2011	10.09	14,96	4,19	3.82
Kota Payakumbuh	2012	9	13,68	5,11	4.20
Kota Payakumbuh	2013	7.81	12,88	5,59	4.36
Kota Payakumbuh	2014	7.01	14,35	6,62	4.66
Kota Payakumbuh	2015	6.67	19,78	7,60	5.10
Kota Payakumbuh	2016	6.46	14,65	8,11	5.08
Kota Payakumbuh	2017	5.88	19,56	7,37	5.17
Kota Payakumbuh	2018	5.77	16,68	7,98	5.01
Kota Payakumbuh	2019	5.68	16,19	8,75	5.21
Kota Payakumbuh	2020	5,65	20,84	7,62	4.79
Kota Payakumbuh	2021	6.16	16,90	7,52	4.70
Kota Payakumbuh	2022	5.66	23,57	7,64	4.78

Payakumbuh					
Kota Payakumbuh	2023	5.44	21,22	6,99	4.43
Kota Payakumbuh	2024	5.19	22,23	7,84	4.30
Kota Pariaman	2011	5.66	5,56	5,22	4.74
Kota Pariaman	2012	5.02	5,00	5,24	4.39
Kota Pariaman	2013	5.35	5,20	6,41	4.88
Kota Pariaman	2014	5.12	6,04	6,03	4.85
Kota Pariaman	2015	5.42	6,59	7,21	5.14
Kota Pariaman	2016	5.23	5,23	6,64	5.18
Kota Pariaman	2017	5.2	5,90	7,07	5.03
Kota Pariaman	2018	5.03	5,75	6,96	4.89
Kota Pariaman	2019	4.76	6,14	7,03	5.05
Kota Pariaman	2020	4.1	5,85	6,60	4.55
Kota Pariaman	2021	4.38	7,14	6,13	4.24
Kota Pariaman	2022	4.13	6,74	6,06	4.12
Kota Pariaman	2023	4.2	21,28	7,65	4.13
Kota Pariaman	2024	4.26	8,11	6,54	4.07



Lampiran II Hasil Regresi Data Panel

```
. reg lnkemiskinan lnkemandirian lnbelanja lnpengeluaranpemerintah
```

Source	SS	df	MS	Number of obs	=	266
Model	10.1766495	3	3.3922165	F(3, 262)	=	34.12
Residual	26.0487064	262	.099422544	Prob > F	=	0.0000
				R-squared	=	0.2809
				Adj R-squared	=	0.2727
Total	36.2253559	265	.136699456	Root MSE	=	.31531

	lnkemiskinan	Coef.	Std. Err.	t	P> t	[95% Conf. Interval]
lnkemandirian		-.3581005	.0419797	-8.53	0.000	-.440761 - .2754401
lnbelanja		.1813454	.0640281	2.83	0.005	.0552703 .3074206
lnpengeluaranpemerintah		.0642275	.0803329	0.80	0.425	-.0939528 .2224077
_cons		1.37157	.3461992	3.96	0.000	.6898827 2.053257

```
. xtreg lnkemiskinan lnkemandirian lnbelanja lnpengeluaranpemerintah, fe
```

Fixed-effects (within) regression

Group variable: kota

Number of obs = 266
Number of groups = 19

R-sq:
within = 0.4211
between = 0.0663
overall = 0.0009

Obs per group:
min = 14
avg = 14.0
max = 14

corr(u_i, Xb) = -0.5582

F(3,244) = 59.16
Prob > F = 0.0000

	lnkemiskinan	Coef.	Std. Err.	t	P> t	[95% Conf. Interval]
lnkemandirian		-.0253588	.0373795	-0.68	0.498	-.0989866 .0482689
lnbelanja		.1265229	.0338047	3.74	0.000	.0599366 .1931092
lnpengeluaranpemerintah		-.6544908	.0679578	-9.63	0.000	-1.7883496 -.520632
_cons		5.773365	.3378554	17.09	0.000	5.10788 6.43885
sigma_u		.42520351				
sigma_e		.14067094				
rho		.90134766				(fraction of variance due to u_i)

F test that all u_i=0: F(18, 244) = 59.58 Prob > F = 0.0000

```
. estimate store fe
```

```
. xtreg lnkemiskinan lnkemandirian lnbelanja lnpengeluaranpemerintah
```

Random-effects GLS regression

Group variable: kota

Number of obs = 266
Number of groups = 19

R-sq:
within = 0.4168
between = 0.0363
overall = 0.0009

Obs per group:
min = 14
avg = 14.0
max = 14

Wald chi2(3) = 147.83
Prob > chi2 = 0.0000

corr(u_i, X) = 0 (assumed)

	lnkemiskinan	Coef.	Std. Err.	z	P> z	[95% Conf. Interval]
lnkemandirian		-.0680213	.0377602	-1.80	0.072	-.1420299 .0059872
lnbelanja		.1192601	.035218	3.39	0.001	.0502342 .188286
lnpengeluaranpemerintah		-.5635576	.0684523	-8.23	0.000	-1.6977217 -.4293936
_cons		5.288426	.3450164	15.33	0.000	4.612207 5.964646
sigma_u		.26253159				
sigma_e		.14067094				
rho		.77693545				(fraction of variance due to u_i)

```
. estimate store re
```

```
. hausman fe re
```

	Coefficients		(b-B) Difference	sqrt(diag(V_b-V_B)) S.E.
	(b) fe	(B) re		
lnkemandir-n	-.0253588	-.0680213	.0426625	.
lnbelanja	.1265229	.1192601	.0072628	.
lnpengelua-h	-.6544908	-.5635576	-.0909332	.

b = consistent under H₀ and H_a; obtained from xtreg
B = inconsistent under H_a, efficient under H₀; obtained from xtreg

Test: H₀: difference in coefficients not systematic

chi2(3) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B)
= 378.14
Prob>chi2 = 0.0000
(V_b-V_B is not positive definite)

Variable	VIF	1/VIF
lnpengelua~h	2.66	0.375338
lnbelanja	2.46	0.406967
lnkemandir~n	1.16	0.864959
Mean VIF	2.09	

Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test for heteroskedasticity

Ho: Constant variance

Variables: fitted values of lnkemiskinan

chi2(1) = 2.15
 Prob > chi2 = 0.1422

Skewness/Kurtosis tests for Normality

Variable	Obs	Pr(Skewness)	Pr(Kurtosis)	joint	
				adj chi2(2)	Prob>chi2
lnkemiskinan	266	0.9195	0.0444	4.08	0.1301
lnkemandir~h	266	0.4713	0.6327	0.75	0.6860
lnbelanja	266	0.0730	0.9687	3.24	0.1981
lnpengelua~h	266	0.2191	0.0833	4.54	0.1034

